

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Model Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialaminya³⁰. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2013, menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaannya baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, baik secara mental, emosi, dan fisik. Yang termasuk kedalam anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Konsep anak berkebutuhan khusus mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam pendidikan membutuhkan pelayanan yang spesifik, lain hal dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak³¹.

³⁰ Desiningrum, D.R. Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Depdiknas (cetakan pie). (Yogyakarta: Psikosain Ruko Jambusari 7A Yogyakarta. 2016). h.36

³¹ Dadang, G. *Pengantar pendidikan inklusif*. (Bandung: PT Refika Aditama: 2015) h.27

Secara umum dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang berbeda dengan anak normal pada umumnya yang mengalami keterbatasan dari segi fisik, mental, sosial maupun intelektual bahkan terkadang juga mengalami keluarbiasaan dari anak normal pada umumnya. Dalam bidang pendidikan Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya. Meskipun layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan anak normal karena mereka memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Keadaan inilah yang menuntut untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus.

Terdapat tiga model pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu; segregasi, integrasi, dan inklusif. Pendidikan segregasi secara bahasa *segregate* yang memiliki arti memisahkan atau segregation yang berarti pemisahan, yang selanjutnya diartikan sebagai sebuah proses pemisahan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik non berkebutuhan khusus. Adapun kaitannya dengan pendidikan luar biasa yang terdapat dalam sejumlah regulasi yaitu sistem pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem pendidikan pada umumnya. Pendidikan segregasi merupakan sistem layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tertua di Indonesia.³² Pemberian pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus diatur dengan PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa³³.

³² Ibdaul Latifah. "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusif, apa bedanya?." *Jurnal Pendidikan* 29.2 (2020): 101-108

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa.

Pendidikan segregasi yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa adalah suatu sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem layanan pendidikan anak normal³⁴. Pendidikan segregasi adalah sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tertentu yang ada di tanah air kita. Pendidikan segregasi bukan hanya sekedar pemisahan tempat atau lokasi tetapi juga keseluruhan program penyelenggaraan yang terpisah antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Pendidikan segregasi muncul akibat anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Artinya terdapat perbedaan sehingga timbul kekhawatiran terhadap kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus apabila disatukan dengan anak-anak normal pada umumnya. Dengan anggapan ini anak berkebutuhan khusus haruslah mendapatkan layanan pendidikan secara khusus (terpisah dari anak normal). Maka munculah konsep pendidikan Luar Biasa identik dengan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Mainstreaming memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk ditempatkan secara bersama ke dalam kelas reguler (umum) dengan teman sebayanya dan belajar bersama dengan kemampuan yang dimilikinya dengan beberapa modifikasi dari sekolah dari segi layanan dan pengaturan pendidikan³⁵. Dengan kata lain *mainstreaming* adalah layanan pendidikan khusus yang ditujukan kepada anak berkebutuhan khusus dengan menempatkan mereka ke dalam sekolah-sekolah yang umum dengan berbagai modifikasi layanan dan pengaturan dari sekolah dalam melayani anak berkebutuhan khusus.

³⁴Casmini, M. *Pendidikan segregasi*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).h.25

³⁵ Lópe, Ag. F. *Social Skills Training for Autistic Children: A Comparison Study Between Inclusion and Mainstreaming Education*. *Academic Journal of Pediatrics & Neonatology*, 1(3), 65–74. 2016

Konsep *Mainstreaming* adalah bahwa pendidikan khusus tidak harus terpisah dari yang umum. Dari beberapa pengertian *mainstreaming* menunjukkan bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus bersifat tidak tetap (dapat berubah sesuai dengan kebutuhan), berdasarkan dari hasil kebutuhan pendidikan yang banyak melibatkan berbagai profesi seperti psikolog, tenaga medis, guru khusus, psikiater, dan fisioterapi.

Pendidikan Integrasi, secara bahasa kata integrasi berasal dari kata *integrate* yang memiliki arti menyatukan atau *integration* yang memiliki arti penyatuan. Pendidikan integrasi adalah penyatuan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Sistem pendidikan integrasi didasarkan pada SK Mendikbud Tahun 1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak berkebutuhan Khusus, dan surat edaran Dirjen Dikdasmen tahun 1989 tentang Perluasan Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, serta UU Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang cacat pasal 6 ayat (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Integrasi adalah istilah yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat yang berarti memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler.

Integrasi sering juga disebut dengan *mainstreaming*³⁶. Akan tetapi pendidikan integrasi belum tentu juga menerapkan konsep *mainstreaming*. Contoh kasusnya adalah beberapa anak sekolah dasar yang tanpa disadari adalah anak berkebutuhan khusus dan tampaknya memang pendidikan integrasi karena antara yang berkebutuhan khusus dan anak normal menjadi satu kelas, tetapi pengajarannya terkadang tidak menerapkan konsep *mainstreaming*³⁷. Sistem pendidikan integrasi

³⁶ Rahim, A. Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Dalam Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3, 68–71. 2016

³⁷ Mambela, S. *Mainstreaming* sebagai Alternatif Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia. *Sosiohumanika*, 3(2), 295–304. 2010

juga disebut dengan sistem pendidikan terpadu yaitu sistem pendidikan yang memadukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Penyatuan tersebut dapat bersifat sebagian atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi bahkan dapat bersifat menyeluruh.

Pendidikan inklusif, secara bahasa kata inklusif berasal dari kata *include* yang memiliki arti mencantumkan, menyertakan, atau memasukkan atau *inclusion* yang memiliki arti pencantuman, penyertaan, dan penyertaan. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyertakan atau memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya non-berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki landasan yuridis UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa³⁸.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Pendidikan segregasi, mainstreaming, integrasi dan inklusif adalah layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan segregasi adalah layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam layanan bidang pendidikan, sehingga anak berkebutuhan khusus berada di sekolah khusus. Sedangkan pendidikan mainstreaming, integrasi dan juga inklusif adalah layanan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam bidang pendidikan yang ditempatkan dalam satu sekolah umum. Meskipun sama tetapi

³⁸ Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

mainstreaming, integrasi dan inklusif mempunyai perbedaan dalam segi pelayanan, jika mainstreaming dan integrasi peserta didik menyesuaikan segala kegiatan yang ada di sekolah jika inklusif sekolah yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Meskipun *mainstreaming* sering diistilahkan dengan integrasi akan tetapi istilah ini berbeda, *mainstreaming* adalah model layanan khusus yang didalamnya terdapat konsep integrasi.

B. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan terbuka untuk anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak pada umumnya dalam satu lingkungan pendidikan. Menurut Bintoro yang dikutip oleh Abdul Rahim menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya. Menurut Permendiknas No 70 tahun 2009 pasal 1 Pendidikan Inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendidikan yang mengharuskan anak penyandang disabilitas diasuh bersama dengan anak lain di sekolah umum sesuai dengan kemampuannya³⁹. Oleh karena itu, Pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga untuk anak lainnya yang dapat membantu mereka dalam proses

³⁹ Rose, R. Dan Howley, M. *The Practical Guide to Special Education Needs in Inclusive Primary Classrooms*. (London: Paul Chapman Publishing).2007. h.37

belajar. Pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya⁴⁰. Dengan demikian, Pendidikan inklusif menekankan pentingnya kesempatan bagi semua siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, tanpa memandang perbedaan⁴¹.

Pendidikan inklusif memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, tanpa memandang perbedaan. Pendidikan inklusif berprinsip pada kesetaraan, keadilan, dan tanpa diskriminasi, serta berfokus pada pengembangan keterampilan hidup dan kemampuan sosial yang lebih luas⁴². Dengan demikian, pendidikan inklusif dapat meningkatkan toleransi sosial dan mempromosikan budaya yang inklusif dan akomodatif terhadap semua anak didik. Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak disabilitas dapat dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang lebih humanis dan demokratis karena memberikan kesempatan pada keragaman anak tanpa membedakan kecacatan dengan yang normal. Pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya untuk menuntaskan wajib belajar bagi anak disabilitas yang tidak pernah kunjung selesai dalam usaha

⁴⁰ Vermeulen, J. A., Denessen, E., & Knoors, H. *Mainstream teachers about including deaf or hard of hearing students. Teaching and Teacher Education*, 28(2), 174-181.2012

⁴¹ Dewi, Desy Eka Citra, and Elfahmi Lubis. "Implementation of Adaptive Management To Improve The Quality of Process Standards In Inclusion Schools." *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan* 25.1 (2023): 117-130.

⁴² Mayya, M., Sa'ud, U. S., & Meirawan, D. Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 16(1), 108-117,2019.

pemerataan pendidikan melalui program segregasi atau sistem terpisah (SLB/SDLB)⁴³.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama menegaskan bahwa pendidikan inklusif diselenggarakan pada seluruh jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi keagamaan. Dalam regulasi ini, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memberikan akses, layanan, dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, baik dalam aspek pembelajaran, asesmen, sarana prasarana, maupun layanan akademik dan nonakademik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak lagi dipahami sebagai isu pendidikan dasar dan menengah semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi yang menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi.

Pendidikan inklusif sebagai sistem pendidikan yang memberikan layanan dengan berbagai jenis perbedaan individual merupakan hal yang tidak mudah dilakukan manakala tidak ada kesepahaman dan kesamaan visi dalam melaksanakan program pendidikan inklusif. Ketidakberhasilan dalam layanan inklusif selama ini lebih banyak disebabkan karena kurang siapnya sekolah dan guru di sekolah biasa, dengan demikian sebagai salah satu upaya pemberian layanan pendidikan bagi anak disabilitas, maka respon dan kepedulian dari berbagai pihak untuk menuntaskan masalah pendidikan disabilitas ini sangat dibutuhkan salah satunya adalah madrasah sebagai lembaga yang juga menangani pendidikan bangsa yang sudah diakui keberadaannya serta keberhasilannya.

⁴³ Anjarsari A. D. and Sulthoni M. E., *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Jenjang SD, SMP, Dan SMA Di Kabupaten Sidoarjo*, FIP, Pendidikan Luar Biasa (Universitas Negeri Malang, 2015).

Pendidikan inklusif di madrasah perlu dilakukan agar pemerataan pendidikan bagi anak disabilitas segera terwujud. Madrasah inklusif memiliki kelebihan dibanding inklusif di sekolah biasa karena madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang lebih menghargai dan memberikan kesempatan pada siswa dengan didasarkan pada pengabdian diri pada Allah SWT. Anak disabilitas dengan belajar di madrasah selain merasa menyatu dengan teman sebayanya juga mendorong perkembangan keterampilan sosialnya. Dengan belajar di madrasah, anak disabilitas akan terbangun persepsi diri dan konsep diri yang positif karena bertambahnya keimanan pada diri anak. Dengan kekuatan iman yang dimiliki akan meningkatkan penerimaan dirinya lebih baik. Semua yang dialami dalam hidupnya semata-mata karena ketentuan Allah yang harus diterima secara ikhlas.

Pendidikan inklusif memiliki karakter atau ciri-ciri yaitu, 1) pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya untuk menemukan pola pendidikan yang memadukan anak disabilitas bersama dengan anak normal; 2) pendidikan inklusif membangun paradigma pendidikan yang menyamakan anak disabilitas dari eksklusif menjadi inklusif; 3) pendidikan inklusif mengusahakan agar anak yang mengalami disabilitas dapat belajar bersama dengan temannya yang normal, bermain bersama, di sekolah yang sama sehingga terbangun interaksi sosial yang saling menghargai sebagai pengalaman yang berguna dalam hidup anak disabilitas; dan 4) pendidikan inklusif dipersiapkan bagi anak disabilitas yang membutuhkan layanan pendidikan khusus⁴⁴. Dalam konteks pendidikan, pendekatan inklusif dalam praktiknya lebih memberikan peluang bagi anak disabilitas untuk memahami, menyadari diri dan

⁴⁴ Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2004).

mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan penuh kebebasan dan kreativitas dalam atmosfer pendidikan biasa.

Pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya⁴⁵. Inklusif sebagai model layanan pendidikan bagi anak disabilitas belajar di kelas khusus bersama dengan pembimbing khusus dan selanjutnya diintegrasikan di kelas biasa sesudah semuanya siap.

Masih banyak sekolah inklusif yang belum berjalan karena banyaknya kendala terkait dengan belum siapnya guru-guru umum atau tidak memiliki pemahaman pendidikan untuk anak disabilitas, guru-guru masih membutuhkan tambahan pembekalan/ pelatihan pendidikan inklusif, hal ini disebabkan ketidakpahaman guru dalam melaksanakan pendidikan inklusif⁴⁶. Terbatasnya guru khusus, kurikulum inklusif, serta model pelaksanaan pendidikan yang terintegrasi dalam layanan inklusif. Tidak meratanya pendidikan bagi anak disabilitas baik melalui sistem pendidikan eksklusif dalam bentuk SLB maupun SDLB, serta tidak berjalannya program pendidikan inklusif sesuai dengan rencana, maka dapat dikatakan bahwa pemerataan pendidikan bagi anak disabilitas masih memiliki masalah yang serius.

Kondisi di atas perlu direspon dengan adanya percepatan penyediaan layanan pendidikan bagi anak disabilitas dengan

⁴⁵ Shopyatun AR. and Rasido I., "Pengembangan Bahan Ajar Anak Berkebutuhan Khusus Untuk Pendidikan Inklusif Bagi Mahasiswa Program Studi PG/PAUD FKIP Universitas Tadulako," *Tri Sentra Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2013, hlm. 3.

⁴⁶ Haryono, Syaifudin A, and Widiastuti S., "*Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Provinsi Jawa Tengah*," hlm. 121.2019

memberdayakan madrasah sebagai bagian dari lembaga yang menangani pendidikan dibawah Kementerian Agama. Madrasah sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi dengan memberikan pendidikan yang berbasis keagamaan, juga memiliki tugas yang sama untuk memberikan pendidikan bagi anak disabilitas.

Meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, disarankan untuk memperhatikan pembelajaran dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan disabilitasnya. Guru sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran memiliki tanggung jawab yang besar bagi peningkatan kemampuan belajar siswa. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk siswa ABK di tingkat Sekolah Dasar mencakup pengajaran remedial, strategi deduktif dan induktif, pendekatan heuristik, ekspositori, pembelajaran klasikal, kooperatif, serta teknik untuk perubahan perilaku⁴⁷. Selain kesiapan strategi guru, sekolah juga diharapkan memiliki kesiapan dalam penerimaan PDBK. Kesiapan sekolah dalam penerima PDBK harus memperhatikan tenaga pendidik atau pendampingan, perencanaan pembelajaran, dan juga sarana dan prasarana. Dukungan masyarakat juga sangat penting bagi pelaksanaan program sekolah. Permasalahan pendidikan tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah dan/atau institusi sekolah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat (orang tua, keluarga/wali, masyarakat luas) untuk mengatasi permasalahan pendidikan inklusif dan melaksanakan program pendidikan⁴⁸.

Kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan inklusif. yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013

⁴⁷ Yuwono, I., & Mirnawati, M.. Strategi Pembelajaran Kreatif Dalam Pendidikan Inklusif Di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 2015–2020. 2021

⁴⁸ Udhiyanasari, K. Y. Sikap Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif. *Joeai (Journal Of Education And Instruction)*, 2(1), 15–24.2019

dan PMA No. 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah di pasal 14, 16, dan 18 menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyusun buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah yang salah peruntukan sebagai panduan bagi 22 Madrasah yang menjadi *piloting project* penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah.

Pada tahun 2019 keluar PMA tentang Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikan formal dasar dan menengah di bawah kementerian Agama. Pada tahun yang sama juga terdapat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Raudhatul Athfal. Regulasi selanjutnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penetapan madrasah inklusif⁴⁹, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah⁵⁰.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah sudah berlangsung sejak lama, namun pada tahun 2013 Kemenag mulai mengembangkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Secara formil berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif, yang terdiri dari beberapa provinsi; Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara barat, dan Banten. Namun, dalam sebuah hasil

⁴⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusif

⁵⁰ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah

riset pada 11 dari 22 madrasah yang ditetapkan sebagai *piloting project* menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam penyelenggaraannya, dan 11 madrasah belum mengimplementasikan buku panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah, dari sisi konteks, input, proses, dan output masih ditemukan kesenjangan yang cukup berarti⁵¹. Dalam studi lainnya yang dilakukan pada salah satu madrasah yang menjadi *piloting project* juga mengalami hal hampir serupa⁵².

Pendidikan inklusif sebenarnya mampu memberikan kesempatan kepada siswa muslim penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan bersekolah di Madrasah. Madrasah inklusif di Indonesia sebenarnya menjadi solusi bagi marginalisasi siswa muslim penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di Madrasah. Pertumbuhan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah dapat terjadi melalui *top down*. Secara *top down* terdapat *good political will* dari kementerian Agama Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan sejumlah kebijakan tentang madrasah inklusif.

C. Sejarah Pendidikan Inklusif

Agama Islam sesungguhnya sudah mengajarkan pendidikan inklusif sejak zaman Nabi Muhammad SAW berdasarkan QS. ‘Abasa ayat 1–10 mengandung pesan teologis yang sangat kuat tentang kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penolakan diskriminasi, yang relevan sebagai landasan pendidikan inklusif. Ayat-ayat ini mengisahkan teguran Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ ketika beliau bermuka masam dan berpaling dari seorang sahabat tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang dengan niat tulus untuk

⁵¹ Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (Pilot Project 2015) yang di publish pada <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id>

⁵² Sumarni, "Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah." *Edukasi* 17.2 (2019): 158-171

belajar, sementara perhatian justru tertuju kepada para pembesar Quraisy. Selain itu didukung hadis Rasulullah “Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula non-Arab atas Arab, tidak pula yang berkulit merah atas yang hitam, dan tidak pula yang hitam atas yang merah, kecuali karena ketakwaan.” HR. Ahmad no. 23489.

Pada abad ke-20 Pendidikan inklusif dipromosikan melalui gerakan hak asasi manusia dunia ketika banyak negara mulai meninjau kembali praktik segregasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Kesadaran global meningkat setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Perkembangan pemikiran ini mendorong lahirnya berbagai kebijakan internasional yang menekankan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk kelompok rentan. Menurut *UNESCO*⁵³, pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan peserta didik dengan keragaman latar belakang dapat belajar bersama secara bermakna.

Tonggak penting pendidikan inklusif secara global adalah *Salamanca Statement* tahun 1994 yang dideklarasikan oleh UNESCO. Pernyataan ini menekankan bahwa sekolah umum harus mengakomodasi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dokumen tersebut mendefinisikan inklusi sebagai upaya menghilangkan hambatan belajar serta memastikan keterlibatan semua siswa dalam proses pendidikan⁵⁴.

⁵³ UNESCO, *Inclusion and Education: All Means All* (Paris: UNESCO Publishing, 2020).

⁵⁴ Lani Florian and Mhairi Beaton, “*Inclusive Pedagogy in International Contexts*,” *International Journal of Inclusive Education*, 2021.

Salamanca menjadi dasar filosofis dan praktis yang memandu negara-negara dalam mengembangkan sistem pendidikan inklusif.

Memasuki abad ke-21, isu pendidikan inklusif semakin menguat seiring adopsi *Sustainable Development Goals (SDGs)* terutama tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas. Konsep “*education for all*” diterjemahkan ke dalam komitmen global untuk memastikan kesempatan belajar yang adil bagi semua kelompok. Laporan *UNICEF* menunjukkan bahwa negara-negara maju maupun berkembang mulai mengintegrasikan kebijakan inklusi dalam sistem pendidikan nasional sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran tentang hak anak.

Di kawasan Asia Tenggara, pendidikan inklusif berkembang lebih pesat setelah adanya dukungan dari organisasi internasional seperti SEAMEO dan UNESCO Bangkok. Negara-negara di kawasan ini mulai melakukan reformasi pendidikan, termasuk kebijakan integrasi anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler. Negara ASEAN mengalami kemajuan signifikan meskipun masih menghadapi tantangan implementasi seperti kurangnya guru terlatih dan fasilitas pendukung⁵⁵.

Penerapan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak lama, yakni sekitar tahun 1960-an. Pada masa tersebut, beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung berhasil diterima di sekolah umum, meskipun masih terdapat penolakan dari pihak sekolah⁵⁶. Sejak itu sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra.

⁵⁵ Lani Florian and Mhairi Beaton, “*Inclusive Pedagogy in International Contexts,*” *International Journal of Inclusive Education*, 2021.

⁵⁶ Munawir Yusuf, Endang Widyorini, & Julia Maria van. *Cerdas Istimewa di Kelas Inklusi: Buku Pegangan Guru dan Calon Guru.* (Prenada Media: Jakarta.2020).24

Keseriusan pemerintah dalam mendukung pendidikan inklusif menetapkan beberapa regulasi berikutnya seperti terbitnya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,

Masuknya pendidikan inklusif ke Indonesia dapat dilacak sejak awal tahun 2000-an, khususnya setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan. Undang-undang ini mengakui hak semua warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah adanya konvensi Salamanca sebagai simbol dimulainya program pendidikan inklusif, pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan meletakkan komitmen menuju pendidikan inklusif. Kemudian pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi yang menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi, rekomendasi ini mengupayakan agar terus ada pengembangan pendidikan inklusif secara terus menerus agar anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik⁵⁷. Pemerintah kemudian melanjutkan upaya penguatan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa. Menurut *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek, 2021)*, regulasi ini menjadi dasar penyelenggaraan inklusi di sekolah-sekolah Indonesia. Untuk lebih memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif

⁵⁷ Rasmitadila. *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. (Rajagrafindo Persada: Depok.2020).35

selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dan yang berkaitan dengan fasilitas dan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang Disabilitas, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 13 tahun 2020 tentang Fasilitas Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas, yang selanjutnya keluar Permendikbud Ristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi.

Indonesia menganut dualisme sistem pendidikan, pendidikan umum di sekolah diselenggarakan oleh Kementerian Dasar dan Menengah, sedangkan pendidikan Keagamaan seperti madrasah dan pesantren, diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dengan sistem ini, Kementerian Agama memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan dan memastikan bahwa layanan pendidikan dapat diakses oleh semua anak tanpa terkecuali. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kementerian Agama diharapkan dapat menyentuh dan menjangkau semua anak dimanapun anak tinggal di semua wilayah di Indonesia.

Pendidikan inklusif di lingkungan madrasah sejatinya telah dimulai sejak dideklarasikannya sejumlah madrasah inklusif di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta yang sebelumnya bernama PGSLB telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan tunanetra dan tunadaksa sejak tahun 1968⁵⁸. Kemudian disusul oleh MAN 1 Kota Sukabumi Jawa Barat yang mulai menerima peserta didik tunanetra pada tahun 1995, MAN Cijerah Kota Bandung dan MTs Cipatat Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2003,

⁵⁸ Kemenag RI. Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif. (Dirjen Pendis: 2023).6-7

MIT Ar Roihan Lawang Kabupaten Malang Jawa Timur pada tahun 2008, MI Ma'arif Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah pada tahun 2011, serta banyak madrasah lain yang secara mandiri membuka akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan.

Secara resmi, dukungan pemerintah melalui Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dimulai sejak terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, yang menegaskan bahwa MI, MTs, MA/MAK wajib memberikan akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dukungan tersebut diperkuat lagi oleh PMA Nomor 60 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013, yang mendorong pembentukan satuan pendidikan khusus dalam bentuk RALB, MILB, MTsLB, MALB, dan MAKLB. Kehadiran regulasi ini memberikan dorongan dan motivasi baru bagi madrasah untuk mengembangkan layanan pendidikan khusus dan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

Program kerja sama pengembangan madrasah inklusif antara Kementerian Agama RI dan Kedutaan Australia pada tahun 2015, yang melibatkan mitra pelaksana daerah di lima provinsi (MDC Banten, MDC Jawa Timur, MDC NTB, MDC Sulawesi Selatan, dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah) serta menargetkan 20 madrasah inklusif pada jenjang MI dan MTs, telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong gerakan pendidikan inklusif di madrasah. Pertumbuhan madrasah inklusif juga semakin cepat melalui dukungan para mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap isu disabilitas dan pendidikan inklusif di madrasah, seperti UNICEF, Helen Keller Indonesia, LPKIPI, INOVASI, STC, *Save the Children*, *Plan International*, dan berbagai lembaga lainnya.

Dukungan Kementerian Agama RI terhadap pendidikan inklusif juga diwujudkan melalui sejumlah regulasi, seperti diterbitkannya Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3211 Tahun 2016 tentang Penetapan 22 Madrasah Inklusif, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah Tahun 2017, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah dan Kepdirjen Pendis Nomor 604 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan madrasah Inklusif. Dalam penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah, Kementerian Agama turut mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah yang kemudian mengalami perubahan menjadi KMA Nomor 450 tahun 2024 tentang perubahan atas KMA nomor 347 tahun 2022.

Pada akhir tahun 2020, bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020, Kementerian Agama meresmikan Pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Pusat melalui Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6782 Tahun 2020. FPMI merupakan forum pendidik yang sebelumnya dideklarasikan di Serpong pada 20 September 2020, yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Serpong Untuk Madrasah Inklusif 2020. Forum ini dibentuk untuk membantu Kementerian Agama dalam memfasilitasi kolaborasi antara pendidik madrasah, praktisi, dan pemerhati pendidikan inklusif agar bersama-sama memberikan perhatian khusus pada pengembangan penyelenggaraan madrasah inklusif di bawah naungan Kementerian Agama RI. Lebih luas lagi pada tahun 2024 kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang

Disabilitas Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Pada PMA tersebut ada 4 hal pokok yang menjadi penekanan yaitu, 1) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, 2) Penyediaan sarana prasarana, 3) Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dan 4) penyediaan kurikulum.

Kementerian Agama RI yang dimotori oleh Direktorat Pendidikan Islam didukung oleh *Proyek Realizing Education's Promise: Support to Indonesia's Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform)* IBRD Loan Number 8992-ID Tahun Anggaran 2020, telah bekerja sama menerbitkan beberapa Modul dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah diantaranya Modul Pelatihan Pendidik Inklusif, Modul 1 inklusif (KKM), modul 2 inklusif (KKG), Roadmap Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif Tahun 2023–2026 yang terdiri dari; 1) Buku 1 Roadmap Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif pada Madrasah Tahun 2023–2026, 2) Buku 2 Roadmap Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2023–2026,

Pada tanggal 25 februari 2022, Dirjen Pendis telah menyampaikan surat kepada seluruh Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Bidang pendidikan Madrasah atau Pendidikan Islam seluruh Indonesia, menyampaikan tentang petunjuk Teknis Penetapan madrasah Inklusif. Dan seiring dengan itu pada bulan Agustus tahun 2023 peneliti diundang mengikuti pelatihan Penguatan Kapasitas Madrasah Inklusif Angkatan 3 di Sumatera Barat. Sejak saat itu peneliti baru tersadar dan tergugah betapa penting dan daruratnya praktek pendidikan di madrasah yang selama ini dilaksanakan, karena masih jauh dari pelayanan yang seharusnya dilakukan kepada peserta didik yang

mengalami hambatan dan kesulitan secara akademik. Para pendidik masih mengalami kesulitan dan belum tau cara pemberian layanan dalam proses pembelajaran, bahkan sering siswa ditinggalkan untuk belajar sendiri ataupun tidak naik kelas.

Wadah untuk membantu Kementerian Agama dalam memfasilitasi kolaborasi antara pendidik madrasah, praktisi, dan pemerhati pendidikan inklusif agar bersama-sama memberikan perhatian khusus pada pengembangan penyelenggaraan madrasah inklusif di bawah naungan Kementerian Agama RI adalah FPMI yang terstruktur dari Pusat sampai ke daerah. Kemudian Bersama-sama peserta pelatihan membentuk FPMI wilayah Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Forum Pendidik Madrasah Inklusif Pusat Nomor: 080/FPMI/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. Peneliti terus melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, tapi sangat disayangkan sampai saat ini madrasah yang sudah ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan petunjuk teknisnya baru ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebanyak 13 madrasah yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 10 tahun 2024. Oleh karena itu melalui penelitian ini setidaknya memberikan andil dan pemikiran untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif di provinsi Bengkulu agar hak-hak peserta didik berkebutuhan khusus dapat terpenuhi dan dapat mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik regular lainnya tanpa diskriminasi.

Seiring perkembangan zaman, Indonesia semakin memperluas komitmen terhadap pendidikan inklusif. Pada kurikulum Merdeka Belajar, prinsip diferensiasi dan layanan individu menjadi bagian penting dalam mendukung keragaman kebutuhan belajar peserta didik. Guru

didorong untuk menerapkan strategi pembelajaran yang adaptif, menyediakan asesmen fleksibel, serta mengelola lingkungan belajar yang ramah inklusi. Bahwa pendekatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh siswa tanpa kecuali memiliki kesempatan mengembangkan potensi secara optimal⁵⁹.

Hal ini juga sangat relevan dengan implementasi Kurikulum Berbasis Cinta, yakni kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai cinta dan kasih sayang di dalam seluruh aspek pendidikan baik itu kepemimpinan yang welas asih, pembelajaran mendalam, pengelolaan kelas yang inklusif, budaya madrasah dan peran serta orang tua dan masyarakat. Panca cinta yang meliputi cinta Allah dan rasul, cinta ilmu, cinta alam/lingkungan, cinta diri dan sesama manusia serta cinta tanah air menjadi ruh pendidikan yang harus masuk dan tertanam ke dalam seluruh aspek pendidikan di madrasah, yang diperankan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan madrasah. Yang pada akhirnya nanti meluluskan murid yang berkarakter dan terwujudnya 8 dimensi profil lulusan.

Meskipun banyak kemajuan, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan guru, serta kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Namun, tren kebijakan dan penelitian terbaru menunjukkan arah yang lebih positif terhadap penguatan praktik inklusi di sekolah. Dengan komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, pendidikan inklusif di Indonesia diproyeksikan terus berkembang menuju sistem pendidikan yang benar-benar setara dan berkeadilan⁶⁰.

⁵⁹ S. Rahmawati, "Faktor Pendukung Keberhasilan Sekolah Inklusi," *Jurnal Pendidikan Khusus* 8, no. 3 (2023).

⁶⁰ Andi Putra and Melati Lestari, "Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia Pasca Kebijakan Merdeka Belajar," *Jurnal Pendidikan Nasional* 5, no. 2 (2021).

D. Landasan Teori Pendidikan Inklusif

Pendidikan itu mengarah pada tujuan yang pada hakikatnya adalah terwujudnya kesejahteraan yang setinggi-tingginya pada subjek didik. Nilai-nilai yang berkenaan dengan kemanusiaan menjadi muatan dalam teori pendidikan, dengan berpegang pada proposisi bahwa pendidikan adalah pelaksana dari filsafat antropologi maka beberapa pengertian dasar (*anthropological constants*) perlu diperhitungkan dalam penyusunan teori⁶¹. Berikut ini beberapa teori pendidikan yang dapat dijadikan landasan dalam mengkaji konsep pendidikan holistik:

1. Teori Keadilan Sosial (John Rawls)

Pendidikan inklusif memiliki dasar dalam teori keadilan sosial, yang mengedepankan prinsip bahwa setiap individu, tanpa kecuali, berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan. John Rawls⁶² dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan bahwa untuk mencapai keadilan, distribusi sumber daya, termasuk pendidikan, harus memperhatikan kebutuhan orang-orang yang paling membutuhkan.

2. Teori Sosial-Emosional (Lev Vygotsky)

Lev Vygotsky⁶³ menyatakan bahwa pembelajaran adalah hasil interaksi sosial dan bahwa individu belajar dengan lebih efektif melalui kolaborasi. Teori ini mendasari pendekatan inklusif dengan menekankan pentingnya interaksi antara siswa dengan beragam kemampuan, yang memperkaya pengalaman belajar mereka.

⁶¹ Ghani, A. R., & Riadi, S. Pendidikan holistik, konsep dan implementasi dalam pendidikan. Uhamka Press, 2012

⁶² Rawls, John. *A Theory of Justice*. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.

⁶³ Vygotsky, Lev. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978), hlm. 86.

3. Teori Konstruktivisme (Jean Piaget)

Piaget⁶⁴ mengajukan bahwa perkembangan kognitif anak berkembang dalam tahap-tahap yang terstruktur, dan penting bagi pendidikan untuk memperhatikan tahap perkembangan tersebut. Pendidikan inklusif sejalan dengan pendekatan konstruktivisme, di mana setiap siswa dihargai perbedaan individualitasnya dan didorong untuk belajar melalui pengalaman yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

4. Teori Pendidikan Humanis *Religius*

Istilah pendidikan *humanis religious* mengandung dua konsep pendidikan yang ingin diintegrasikan yaitu pendidikan humanis dan pendidikan *religious*. Pengintegrasian dua konsep pendidikan ini dengan tujuan untuk dapat membangun sistem pendidikan yang dapat mengintegrasikan dari keduanya atau mengurangi kelemahannya. Pendidikan humanis yang menekankan aspek kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan *religious* agar dapat membangun kehidupan individu dan sosial yang memiliki kemerdekaan, tetapi dengan tidak meninggalkan (sekuler) dari nilai-nilai keagamaan yang diikuti masyarakatnya, atau menolak nilai keTuhanan (ateisme)⁶⁵.

Pendidikan harus dipahami sebagai upaya mengembangkan manusia sebagai makhluk berkesadaran (*corpo consciente*), bukan untuk menjadikan manusia sebagai benda terkendali (*automaton*), pendidikan yang menjadikan manusia sebagai benda terkendali adalah

⁶⁴ Piaget, Jean. *The Psychology of Intelligence*. (London: Routledge & Kegan Paul, 1970), hlm. 12.

⁶⁵ Lauricella, S., & MacAskill, S. *Exploring the potential benefits of holistic education: A formative analysis of other education*. *The Journal of Educational Alternatives*, 4(2), 54-78, 2015

suatu perbuatan yang bersifat kontraproduktif terhadap fitrah ontologis manusia. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara optimal, yaitu berupa pengembangan seluruh komponen kemanusiaannya, yaitu upaya pengembangan akal, rasa dan fisik (ranah kognitif, afektif dan psikomotorik).

Makna filosofis dari humanisme adalah konsep peri kemanusiaan sebagai fokus dan satu-satunya tujuan. Pendidikan humanis sebagai pemikiran pendidikan telah berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan dari dua aliran, yaitu *progresivisme* dan *eksistensialisme*⁶⁶.

Prinsip pendidikan humanis *progresivisme* adalah pendidikan berpusat pada anak (*student centered*), guru tidak otoriter berfokus pada keterlibatan dan aktivitas siswa dan aspek pendidikan yang demokratis dan kooperatif. Prinsip pendidikan humanis yang mengacu pada pandangan pada *eksistensialisme* menekankan pada keunikan siswa sebagai individu, dan memberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam diri individu untuk membangun dirinya menjadi seperti apa yang diinginkan.

Teori humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal⁶⁷.

⁶⁶ Masbur. 2015. "Teori Humanistik", Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Perspektif Abraham Maslow, Vol. 01, No. 01

⁶⁷ Maslow, Abraham. Motivasi dan Kepribadian, alih bahasa: Nurul Iman. Bandung: Rosyda Karya. 1993. H. 52

Teori humanistik berpendapat bahwa belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya.

Tujuan pendidikan tidak hanya tujuan humanis, tetapi juga pencapaian tujuan pendidikan keagamaan (religius). Hampir semua agama meletakkan tujuan pendidikan adalah untuk pengembangan moral manusia, agar manusia dapat berkembang menjadi berkarakter baik sehingga hidupnya dapat berguna dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat⁶⁸. Pendidikan yang dapat membangun moral manusia yang baik dan membangun kapasitas (kemampuan) untuk merealisasikan tujuan kehidupan secara produktif adalah pendidikan yang bersifat humanis religious⁶⁹.

Pendidikan humanis religius merupakan pendidikan yang menghargai kemerdekaan anak, dan disisi lain juga menghargai nilai-nilai moral, spiritual, dan keagamaan siswa. Pendidikan humanis religius adalah pendidikan berbasis pada nilai-nilai dasar kehidupan, yakni nilai kebebasan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama.

5. Teori Sosiokultural

⁶⁸ Primarni, Amie. Konsep pendidikan holistik dalam perspektif islam. *Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islami*, Vol 3, No 05,23-31, 2014

⁶⁹ Rianawaty, Ida., Suyata, Dwiningrum, Siti Irene Astuti., & Yanto, Bagus, Endri Yanto. Model of Holistic Education-based Boarding School: A Case Study at Senior High School. *European Journal of Educational Research*, 10(2), 567-580. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.2.567> , 2021

Teori sosiokultural (sosial kognitif/kognitif sosial) juga disebut sebagai teori konstruksi sosial mengungkapkan pentingnya proses kebudayaan dalam pendidikan. Teori sosiokultural menekankan bahwa intelegensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menekankan bahwa perolehan pengetahuan individu terjadi pertama kali melalui interpersonal (interaksi dengan lingkungan sosial) dan intrapersonal (internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri).

Menurut teori belajar sosiokultural kemampuan berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai⁷⁰.

Menurut teori sosiokultural atau kognitif sosial (*social cognitive theory*) yang berperan penting dalam pembelajaran adalah faktor sosial, kognitif, dan perilaku anak. Faktor-faktor kognitif meliputi harapan dan motivasi siswa untuk berhasil sedangkan faktor sosial meliputi pengamatan siswa terhadap perilaku pencapaian orang tua mereka. Teori sosiokultural menekankan bagaimana kebudayaan mempengaruhi penalaran, interaksi sosial, dan pemahaman diri seorang anak.

Teori belajar sosiokultural dikemukakan oleh Vygotsky yang mengemukakan bahwa ada pengaruh interaksi sosial dan kultural

⁷⁰ Primarni, Amie. Konsep pendidikan holistik dalam perspektif islam. Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islami, Vol 3, No 05,23-31, 2014

dalam perkembangan anak. Interaksi sosial mempengaruhi pemikiran dan perilaku anak. Pemikiran anak berkembang jika terlibat dalam kegiatan-kegiatan kultural yang spesifik seperti acara keluarga dan kegiatan kemasyarakatan⁷¹.

Teori sosiokultural menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Fungsi-fungsi mental yang tinggi dari seseorang diyakini muncul dari kehidupan sosialnya. Sementara itu, intramental dalam hal ini dipandang sebagai derivasi atau turunan yang terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut, hal ini terjadi karena anak baru akan memahami makna dari kegiatan sosial apabila telah terjadi proses internalisasi. Oleh sebab itu belajar dan berkembang satu kesatuan yang menentukan dalam perkembangan kognitif seseorang.

Teori belajar sosiokultural atau yang juga dikenal sebagai teori belajar ko-konstruktivistik merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya yaitu Zona Proksimal Development (ZPD) atau Zona Perkembangan Proksimal dan mediasi⁷². Di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Berdasarkan konsep zona perkembangan proksimal, maka sebelum terjadi internalisasi dalam diri anak, atau sebelum

⁷¹ Moll, Luis C. *Vygotsky & Education Instructional Implications and Applications of sociohistorical psychology*. Australia : Cambridge University Press.1993.h.27

⁷² Moll, Luis C. *Vygotsky & Education Instructional Implications and Applications of sociohistorical psychology*. Australia : Cambridge University Press.1993.h.40

kemampuan intramental terbentuk, anak perlu dibantu dalam proses belajarnya. Orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten perlu membantu dengan berbagai cara seperti memberikan contoh, memberikan feedback, menarik kesimpulan, dan sebagainya dalam rangka perkembangan kemampuannya.

Inti dari teori sosiokultural ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Teori ini menekankan konteks social di mana perkembangan terjadi.

E. Filosofi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif berakar pada filosofi humanisme, yang menempatkan setiap manusia sebagai individu yang memiliki martabat dan potensi unik. Humanisme memandang bahwa pendidikan harus membantu setiap peserta didik mengembangkan kapasitas terbaiknya tanpa diskriminasi. Menurut Carl Rogers⁷³, *“the only person who is educated is the one who has learned how to learn and change,”* yang berarti bahwa proses pendidikan harus membuka kesempatan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pandangan ini membentuk dasar moral bahwa sekolah harus menerima keragaman sebagai kekayaan, bukan hambatan.

Perspektif eksistensialisme, pendidikan inklusif memandang setiap anak sebagai subjek yang bebas dan bertanggung jawab untuk menjadi dirinya sendiri. Jean-Paul Sartre⁷⁴ menyatakan bahwa manusia *“is nothing else but what he makes of himself,”* sehingga lingkungan pendidikan harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk

⁷³ Carl Rogers. *Freedom to Learn*. (Columbus: Charles Merrill, 1995).27

⁷⁴ Sartre, Jean-Paul. *Existentialism Is a Humanism*. (New Haven: Yale University Press, 2007.)

menentukan makna dan identitasnya. Sekolah yang inklusif menyediakan kesempatan setara bagi semua anak untuk meraih pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Landasan lain hadir dari pragmatisme, terutama dari pemikiran John Dewey⁷⁵. Dewey menegaskan bahwa “*education is not preparation for life; education is life itself.*” Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang demokratis, plural, dan kooperatif. Maka sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sebagai representasi nyata masyarakat yang menghargai keberagaman dan partisipasi semua individu.

Filosofi rekonstruksionisme sosial juga memberikan dasar kuat bagi pendidikan inklusif. Rekonstruksionisme memandang bahwa pendidikan memiliki peran dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil. George Counts⁷⁶ menyatakan bahwa sekolah harus menjadi agen perubahan yang “*dare to build a new social order.*” Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya menyediakan akses bagi semua, tetapi juga menjadi gerakan untuk menghilangkan stigma dan ketidaksetaraan sosial yang dialami anak berkebutuhan khusus.

Perspektif keadilan sosial menjadi landasan etis yang tidak terpisahkan dari pendidikan inklusif. Pemikiran John Rawls tentang keadilan sebagai *fairness* menekankan bahwa institusi sosial harus merancang sistem yang “*to the greatest benefit of the least advantaged.*” Dalam pendidikan, prinsip ini berarti bahwa sekolah harus memberikan dukungan lebih kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus

⁷⁵ Dewey, John. *Democracy and Education*. (New York: Macmillan, 1998).56

⁷⁶ Counts, George. *Dare the School Build a New Social Order?* (New York: John Day Company, 2001).37

agar mereka dapat mengakses pembelajaran secara setara. Pendidikan inklusif menolak praktik segregasi yang menghambat kesempatan sosial dan akademik anak.

Dari sisi filsafat hak asasi manusia, pendidikan inklusif dipandang sebagai hak fundamental setiap anak. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahwa *“everyone has the right to education.”* Prinsip ini diperkuat oleh Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang menegaskan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama dalam pemenuhan hak-hak peserta didik dengan disabilitas. Landasan ini menegaskan bahwa inklusi bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan legal bagi negara dan lembaga pendidikan.

Secara keseluruhan, landasan filosofis pendidikan inklusif menekankan bahwa semua anak berhak memperoleh pengalaman belajar yang adil, bermakna, dan penuh penghargaan terhadap keragaman. Berbagai aliran filsafat memberikan kontribusi dalam membangun paradigma bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menerima semua peserta didik tanpa memandang latar belakang fisik, intelektual, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, pendidikan inklusif merupakan wujud nyata dari pendidikan yang humanis, demokratis, dan berkeadilan.

Hubungan pendidikan inklusif dengan filsafat pendidikan Indonesia berakar pada Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa. Filsafat pendidikan Indonesia berpijak pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dua sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki martabat yang sama dan berhak atas kesempatan pendidikan

tanpa diskriminasi⁷⁷. Pendidikan inklusif sejalan dengan prinsip ini karena mengedepankan penerimaan terhadap keragaman, penghormatan terhadap hak semua anak, dan pemberian layanan yang adil bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, inklusi merupakan implementasi langsung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pendidikan inklusif itu tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan dari filosofi pendidikan warisan budaya Indonesia misalnya Metode sorogan dalam tradisi pendidikan pesantren merupakan bentuk pembelajaran individual dimana santri menyetorkan bacaan atau pemahaman kitab secara langsung kepada kyai atau ustad sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing santri. Pola pembelajaran ini secara filosofis sejalan dengan konsep pendidikan inklusif, karena menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang unik dan tidak dipaksakan pada standar capaian yang seragam. Dalam sorogan, perbedaan kemampuan kognitif, latar belakang, dan kebutuhan belajar santri diterima sebagai keniscayaan, sementara pendidik berperan memberikan bimbingan personal, koreksi bertahap, dan penguatan sesuai kapasitas individu.

Selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan bertujuan “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Tujuan ini bersifat universal untuk semua anak, termasuk penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif menyediakan lingkungan yang mendukung ketercapaian tujuan tersebut dengan cara

⁷⁷ Notonagoro. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Bina Aksara, 1994).54

menyesuaikan pembelajaran pada kebutuhan individu, bukan memisahkan siswa berdasarkan keterbatasan.

Sejalan dengan tradisi humanisme religius dalam kultur Indonesia, filsafat pendidikan Indonesia memiliki corak humanisme religius, yaitu pandangan bahwa manusia adalah makhluk bermartabat yang diciptakan Tuhan dan harus dihormati⁷⁸. Prinsip ini hidup dalam berbagai budaya Nusantara, seperti gotong royong, tenggang rasa, dan tepa selira. Pendidikan inklusif memperkuat nilai ini karena mengajarkan empati, solidaritas, dan sikap menerima perbedaan sejak dini. Sekolah inklusif pada dasarnya menjalankan nilai kemanusiaan dan keberagaman yang telah lama menjadi fondasi budaya Indonesia.

Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia menegaskan prinsip “pendidikan untuk semua” dan bahwa sekolah harus “menuntun tumbuhnya kodrat anak” sesuai potensi masing-masing⁷⁹. Pendidikan inklusif adalah perwujudan langsung filosofi Ki Hajar Dewantara karena memberikan ruang bagi semua anak, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk berkembang sesuai kodrat dan kemampuan. Konsep Tut Wuri Handayani juga menekankan pendampingan dan pemberdayaan anak, bukan pembatasan melalui segregasi.

F. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif menitik beratkan pada perspektif keberagaman, dalam hal ini, anak diakui sebagai individu yang memiliki keunikannya sendiri dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan landasan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang

⁷⁸ Driyarkara. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. (Jakarta: Gramedia, 2016).35

⁷⁹ Dewantara, Ki Hajar. *Bagian I: Pendidikan*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 2005).

inklusif dan efektif. Perbedaan yang dimiliki menjadi keunikan bagi anak dan diakui sebagai individu yang mempunyai keberagaman martabat serta perbedaan nilai dalam tumbuh kembang anak secara implisit memberikan peluang untuk mewujudkan prinsip-prinsip eksploratif dan kreatif sepanjang tumbuh kembangnya.

Pendidikan inklusif, yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, peletak dasar Pendidikan Indonesia, memfokuskan pada pengembangan karakter manusia Indonesia yang toleran, menghargai keberagaman, ramah, dan multikultural⁸⁰. Dalam implementasinya, sistem pendidikan Indonesia harus memprioritaskan pengintegrasian nilai-nilai ini dalam kurikulum dan metode pengajaran. Dengan demikian, siswa-siswi Indonesia dapat dibesarkan menjadi individu yang memiliki wawasan luas, toleransi, dan kemampuan beradaptasi dengan keberagaman budaya dan agama.

Pendidikan inklusif memiliki beberapa landasan utama yang menjadi dasar pelaksanaannya⁸¹, yaitu:

1. Landasan filosofis, Pendidikan inklusif di Indonesia mengandung Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menghargai hak dan potensi setiap anak. Filosofi ini didasarkan pada “Bhineka Tunggal Ika”, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Keberagaman sebagai kekayaan bangsa menjadi landasan untuk membangun pendidikan yang inklusif dan menghargai perbedaan individu.

⁸⁰ Khairuddin, K. Pendidikan Inklusif Di Lembaga Pendidikan. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1),2020.h.34

⁸¹ Mansir, F. Paradigma Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif Pendidikan Islam: Dinamika Pada Sekolah Islam. *Tadrib*, 7(1), 1-17.2021.

2. Landasan Teologis, QS. ‘Abasa ayat 1–10 mengandung pesan teologis yang sangat kuat tentang kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penolakan diskriminasi, yang relevan sebagai landasan pendidikan inklusif. Ayat-ayat ini mengisahkan teguran Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ ketika beliau bermuka masam dan berpaling dari seorang sahabat tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang dengan niat tulus untuk belajar, sementara perhatian justru tertuju kepada para pembesar Quraisy. Selain itu didukung hadis Rasulullah “Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu dan ayah kalian satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula non-Arab atas Arab, tidak pula yang berkulit merah atas yang hitam, dan tidak pula yang hitam atas yang merah, kecuali karena ketakwaan.” HR. Ahmad no. 23489
3. Landasan Yuridis, Sehubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, telah ada di berbagai peraturan dan perundang diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28E ayat (1) dan (3) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Mengatur tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendidikan Inklusif: Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
4. Landasan Pedagogis, Setiap anak memiliki potensi untuk belajar. Pendidikan inklusif didasarkan pada keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk belajar dan berkembang, terlepas dari latar belakang dan kemampuannya. Perbedaan individu dihargai dan diakomodasi dalam pembelajaran untuk menciptakan lingkungan

belajar yang inklusif. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

5. Landasan Empiris, Penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Inklusif dapat meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan keterampilan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif di mana semua orang dihargai dan dihormati.

G. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa prinsip yakni:

1. Prinsip Keberagaman, Pendidikan inklusif mengakui dan menghargai keberagaman individu, termasuk perbedaan kemampuan, latar belakang, dan budaya. Lingkungan belajar yang inklusif diciptakan agar semua peserta didik merasa diterima, aman, dan dihargai. Segala bentuk diskriminasi dan stigma terhadap peserta didik berdasarkan latar belakang atau kemampuannya dihapuskan.
6. Berbasis Potensi, Pendidikan inklusif fokus pada pengembangan potensi setiap peserta didik secara optimal, tanpa terkecuali. Layanan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan individu diberikan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus mencapai potensi mereka.
7. Partisipasi Penuh, Semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Kerjasama dan kolaborasi dibangun antara berbagai pihak, seperti guru, orang tua, terapis, dan profesional lainnya, untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.

8. Kesetaraan dan Aksesibilitas, Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk infrastruktur, kurikulum, dan pembelajaran. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada saat ini mampu membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengakses informasi dan pembelajaran secara lebih luas.
9. Kesenambungan, Pendidikan inklusif tidak hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar, tetapi juga mencakup pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif terus dikembangkan dan ditingkatkan.

H. Model-Model Pelayanan Pendidikan Inklusif

Pelaksanaan pendidikan inklusif di madrasah dapat menggunakan model pelayanan pendidikan inklusif dengan berbagai model sebagai berikut^{82, 83}:

1. Model Inklusif penuh (kelas reguler)

Model reguler yaitu anak disabilitas belajar bersama anak lainnya (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan kurikulum yang sama⁸⁴. Kelas reguler ini biasanya diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus ringan, misalnya siswa yang memiliki keterbatasan fisik sehingga harus menggunakan kursi roda. Jika siswa tersebut tidak mengalami kondisi lain yang menghambat, maka dia

⁸² David J.Smith. Sekolah untuk semua teori dan implementasi inklusif. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015) hlm 35

⁸³ Muhammad Efendi. 2013. Perspektif Pendidikan Inklusif. Malang : Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang

⁸⁴ Indamurni dan Rahmiati. *Pendidikan inklusif sebagai solusi dalam mendidik anak istimewa*. (Jakarta: Paedea, 2015) hlm 38

dapat masuk ke kelas reguler. Tujuan penerapan model pelayanan inklusif di kelas reguler adalah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama⁸⁵. Tujuan ini didasarkan pada prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta pengembangan potensi secara maksimal⁸⁶.

Keunggulan penerapan model pelayanan inklusif kelas reguler yaitu mendorong penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman, meningkatkan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus, memberikan kesempatan belajar yang setara, mendorong kolaborasi antara guru kelas dan guru pendamping⁸⁷. Sementara kelemahannya yaitu guru harus mempersiapkan strategi diferensiasi pembelajaran yang cukup kompleks untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dalam satu kelas. Banyak guru belum terlatih menghadapi keberagaman kebutuhan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus⁸⁸. Adapun tahapan pembelajaran pada model layanan Inklusif penuh (kelas reguler) sebagai berikut⁸⁹.

⁸⁵ Trianto I.B.T, Titik T.T & TriworoParnoningrum. *Mengembangkan Pendidikan Inklusif di Madrasah*.(Jakarta: Kencana, 2022) hlm 48

⁸⁶ Mulyono, M. *Pendidikan Inklusif: Teori dan Praktik di Sekolah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)hlm.26

⁸⁷ Indamurni dan Rahmiati. *Pendidikan inklusif sebagai solusi dalam mendidik anak istimewa*. (Jakarta: Paedea, 2015) hlm 38

⁸⁸ Gargiulo, R. M., & Metcalf, D. J. *Teaching in Today's Inclusive Classrooms: A Universal Design for Learning Approach*. Cengage Learning.2016

⁸⁹ Nuraini. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa*, (Jawa Barat: Jejak, 2023) hlm.167

Tabel 1. Tahapan pembelajaran model pelayanan kelas reguler

Tahapan	Aktivitas
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> - Guru mempersiapkan berbagai sarana/media pembelajaran - mengatur siswa inklusif duduk bersama siswa reguler - mempersiapkan kondisi siswa sebelum belajar, memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti: Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi	<ul style="list-style-type: none"> - Guru membagi kelompok - Menerapkan strategi kooperatif - Memberikan pengetahuan dan pendidikan karakter - mengamati aktivitas siswa - guru membimbing hasil diskusi - guru menyampaikan penguatan dan memberikan peluang untuk bertanya - memberikan pembahasan pendalaman materi - memberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan kelompok

Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> - guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran - melakukan refleksi
------------------	---

2. Model Pelayanan Dengan *Cluster*

Model pelayanan dengan *cluster* yaitu anak disabilitas belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus^{90,91}. Tujuan dari penerapan model pelayanan inklusif kelas klaster adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dengan cara mengelompokkan mereka dalam satu kelas bersama siswa reguler dan memberikan dukungan khusus sesuai kebutuhan mereka⁹². Keunggulan model *cluster* yaitu siswa berkebutuhan khusus dengan karakteristik yang relatif sama dikelompokkan, sehingga intervensi atau strategi pengajaran bisa lebih tepat sasaran. GPK bisa memberikan layanan yang lebih intensif karena siswa yang dibimbing berada dalam satu kelas atau area yang sama⁹³.

Kendala dalam penerapan pelayanan model *cluster* yaitu (1) jumlah GPK yang terbatas sehingga untuk menangani Peserta didik berkebutuhan khusus apabila tidak dijadikan satu akan kesulitan mengatur jam dan waktunya, (2) kebanyakan peserta didik dengan

⁹⁰ David J.Smith, *Sekolah untuk semua teori dan implementasi inklusif*. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015) hlm 35

⁹¹ Trianto I.B.T, Titik T.T & Triworo Parnoningrum. *Mengembangkan Pendidikan Inklusif di Madrasah*.(Jakarta: Kencana, 2022) hlm 48

⁹² Slamet, S. *Model-Model Layanan Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusif*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010) hlm. 36

⁹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2013). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Pendidik*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

kelainan *low vision* dan *dyslexia* yang dijadikan satu, untuk kelainan yang berat seperti autisme dipisah, (3) interaksi sosial peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang SD kurang bagus sehingga berpengaruh apabila dikelompokkan dengan peserta didik berkebutuhan khusus lainnya. Adapun tahapan pembelajaran pada model pelayanan Inklusif kelas *cluster* sebagai berikut⁹⁴.

Tabel 2. Tahapan pembelajaran model pelayanan kelas *cluster*

Tahapan	Aktivitas
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> - Guru mempersiapkan berbagai sarana/media pembelajaran - mengatur siswa inklusif duduk ditempat khusus. - mempersiapkan kondisi siswa sebelum belajar, memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti: Eksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> - Guru membagi kelompok reguler dan kelompok siswa inklusif - Siswa berdiskusi tentang materi pelajaran - Guru membimbing siswa inklusif - Menerapkan strategi kooperatif
Elaborasi	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pengetahuan - dan pendidikan karakter

⁹⁴ Nuraini, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa*, (Jawa Barat: Jejak, 2023) hlm.168

Konfirmasi	<ul style="list-style-type: none"> - mengamati aktivitas siswa - guru membimbing hasil diskusi - guru menyampaikan penguatan dan memberikan peluang untuk bertanya - memberikan pembahasan pendalaman materi - memberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan kelompok
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> - guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran - melakukan refleksi

3. Model Pelayanan Dengan Pull Out

Model pelayanan dengan *Pull out* yaitu anak disabilitas belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus^{95, 96}. Misalnya siswa yang mengalami diskalkulia, penting bagi mereka untuk tetap berada di kelas reguler mengikuti pembelajaran secara reguler. Namun dalam mata pelajaran berhitung, mereka membutuhkan pendampingan khusus. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak disabilitas

⁹⁵ Syafrida Elisa, Aryani Tri Wrastari, "Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusif Ditinjau Dari Faktor Pembentuk Sikap". *Jurnal PsikologiPerkembangan dan Pendidikan.2*,01. 2013. Hlm 45

⁹⁶ Indamurni dan Rahmiati. *Pendidikan inklusif sebagai solusi dalam mendidik anak istimewa*. (Jakarta: Paedea, 2015) hlm 38

belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler⁹⁷.

Tujuan penerapan model pelayanan inklusif kelas *Pull Out* yaitu memberikan layanan pembelajaran yang lebih intensif dan terfokus, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran individual, mengurangi tekanan akademik dan sosial di kelas reguler, beberapa siswa dengan kebutuhan khusus mungkin merasa kesulitan atau tertekan jika terus-menerus berada di kelas umum. *Pull out* memberi ruang untuk belajar dengan lebih nyaman selain itu memberikan intervensi khusus secara langsung seperti terapi wicara, latihan motorik, pelatihan sosial, atau intervensi akademik tertentu⁹⁸.

Keunggulan penerapan model *pull out* yaitu memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran yang dirasa sulit di ruang sumber. Peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang MI masih sangat membutuhkan guru pendampingan khusus (GPK) dan suasana yang tenang untuk mampu berkonsentrasi. Kelemahan model *pull out* yaitu siswa bisa tertinggal pelajaran saat ditarik keluar untuk sesi *pull out*, terutama jika jadwal tidak diselaraskan dengan materi penting di kelas umum. Kurangnya waktu bersama teman sebaya di kelas reguler bisa mengurangi kesempatan bersosialisasi dan membangun hubungan sosial.

⁹⁷ Sulthon. Model Pelayanan Pendidikan Inklusif Di Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus. *AL-BIDAYAH, Jurnal Pendidikan Dasar Islam*. 10, 02, 2018. h 24

⁹⁸ Friend, M., & Bursuck, W. D.. *Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers*. Pearson Education.2012. hlm. 27

Adapun tahapan pembelajaran pada model pelayanan kelas *Pull out* sebagai berikut⁹⁹.

Tabel 3. Tahapan Pembelajaran Model Pelayanan Kelas *Pull Out*

Tahapan	Aktivitas
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> - Guru mempersiapkan berbagai sarana/media pembelajaran - mengatur siswa inklusif duduk di ruang khusus. - mempersiapkan kondisi siswa sebelum belajar, memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran
Kegiatan Inti: Eksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> - guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa inklusif
Elaborasi	<ul style="list-style-type: none"> - Guru membimbing siswa inklusif - Menerapkan strategi kooperatif - Memberikan pengetahuan dan pendidikan karakter - mengamati aktivitas siswa
Konfirmasi	<ul style="list-style-type: none"> - siswa inklusif diberikan waktu untuk belajar sendiri - guru menyampaikan penguatan dan memberikan peluang untuk bertanya - memberikan pembahasan pendalaman

⁹⁹ Nuraini. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa*, (Jawa Barat: Jejak, 2023) hlm.167

	<p>materi</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan
Kegiatan Penutup	<ul style="list-style-type: none"> - guru memberikan penguatan dan penghargaan atas penyelesaian tugas belajar - melakukan refleksi

Setiap sekolah inklusif dapat memilih model-model mana yang akan diterapkan, terutama bergantung kepada: (1) jumlah anak disabilitas yang akan dilayani; (2) jenis kelainan masing-masing anak; (3) gradasi (tingkat) kelainan anak; (4) ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan; dan (5) sarana dan prasarana yang tersedia.

Model inklusif dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi madrasah. Jika anak disabilitas memiliki kemampuan yang baik atau hambatan yang dialami anak disabilitas tidak terlalu berat maka dapat menggunakan model inklusif penuh, dan jika tidak dapat dilakukan secara penuh dalam model inklusif ini dapat digunakan model *cluster*, *pull out*, atau kelas khusus, dan seterusnya.

Penerapan model inklusif sesungguhnya harus sesuai dengan tingkat hambatan atau kemampuan anak¹⁰⁰. Tahapan penerapan pelayanan inklusif meliputi tiga tahapan yaitu 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dan 3) evaluasi.

1. Tahap Perencanaan terdiri dari:

a. Identifikasi

¹⁰⁰ Nuraini. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa*, (Jawa Barat: Jejak, 2023) hlm.120

Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui adanya peserta didik yang memerlukan layanan khusus¹⁰¹. Proses ini dapat dilakukan oleh guru, orang tua, atau pihak sekolah melalui pengamatan awal, wawancara, atau laporan dari pihak luar (misalnya dokter atau psikolog)¹⁰².

b. Asesmen

Asesmen adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk memahami karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Asesmen dapat meliputi asesmen diagnostik, formatif, sumatif, dan asesmen fungsional. Asesmen bertujuan untuk mengetahui kemampuan akademik dan non-akademik siswa dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Asesmen dalam pendidikan inklusif tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik, tetapi juga memahami kondisi sosial-emosional dan kebutuhan adaptif peserta didik¹⁰³ dengan tepatnya asesmen maka penyusunan rencana pembelajaran bisa dilakukan berdasarkan pada kemampuan dan karakter siswa inklusif¹⁰⁴.

c. Penyusunan Profil Peserta Didik

Profil peserta didik adalah dokumen yang memuat data hasil identifikasi dan asesmen. Profil ini menjadi dasar untuk penyusunan program pembelajaran individual (PPI) dan strategi pembelajaran yang sesuai. Komponen profil peserta didik dapat

¹⁰¹ SK Dirjen Pendis No. 758 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah

¹⁰² Somantri, S. (2006). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Refika Aditama.

¹⁰³ Friend, M., & Bursuck, W. D. (2012). *Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers* (6th ed.). Pearson Education.

¹⁰⁴ Nuraini. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa*, 44

mencakup: Data identitas, Hasil asesmen (kognitif, afektif, psikomotor), Gaya belajar, Potensi dan minat¹⁰⁵.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap ini menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa inklusif, melakukan konfirmasi, elaborasi dan eksplorasi¹⁰⁶. Mengimplementasikan pembelajaran di kelas inklusif dengan penyesuaian metode, media, dan lingkungan belajar. Menggunakan strategi seperti diferensiasi instruksi, kooperatif learning, dan pendampingan khusus¹⁰⁷. Melibatkan guru pendamping khusus (GPK), terapis, psikolog, dan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran. Kolaborasi ini memastikan keterpaduan layanan dan penguatan pembelajaran¹⁰⁸.

3. Tahap evaluasi

Merupakan penilaian hasil pembelajaran dan tindak lanjut serta refleksi pembelajaran¹⁰⁹. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan belajar siswa dan efektivitas PPI. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan menyesuaikan program¹¹⁰.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan tahapan pembelajaran pelayanan antara model Reguler, *Cluster* dan *Pull out* sebagai berikut.

¹⁰⁵ Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.2015

¹⁰⁶ Nuraini. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusif dan Sekolah Luar Biasa*, 44

¹⁰⁷ Sunardi, Yusuf, M., Gunarhadi, Priyono, A., & Yeager, J. L. *The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia. Excellence in Higher Education*, 2(1), 1-10.2011

¹⁰⁸ Friend, M., & Bursuck, W. D. *Including Students with Special Needs: A Practical Guide for Classroom Teachers*. Pearson Education.2012

¹⁰⁹ Dadang Garnida, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, 106

¹¹⁰ Smith, D. D. *Introduction to Special Education: Making a Difference*. Pearson.2010

Tabel 4. Tahapan Desain Model Pelayanan Pendidikan Inklusif

No	Tahapan Pembelajaran	Model Pelayanan Inklusif		
		Reguler	<i>Cluster</i>	<i>Pull out</i>
1	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi peserta didik - Asesmen PDBK - Penyusunan Profil peserta didik - Koordinasi antara GPK dengan guru PAI, - Persiapan metode pembelajaran yang relevan. - Mengatur dan mengkondisikan PDBK duduk bersama siswa reguler 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi peserta didik - Asesmen PDBK - Penyusunan Profil peserta didik - Koordinasi antara GPK dengan guru PAI, - Persiapan metode pembelajaran yang relevan. - Mengatur dan mengkondisikan PDBK duduk bersama siswa reguler - Mengatur ABK duduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi peserta didik - Asesmen PDBK - Penyusunan Profil peserta didik - Koordinasi antara GPK dengan guru PAI, - Persiapan metode pembelajaran yang relevan. - Mengatur PDBK duduk di ruang khusus - Mempersiapkan kondisi siswa sebelum belajar, memberikan

			<p>ditempat khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan kondisi siswa sebelum belajar 	<p>motivasi</p>
2	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Guru membagi kelompok - Menerapkan strategi kooperatif - Memberikan pengetahuan - Mengamati aktivitas siswa - Memberikan penguatan - Guru membimbing hasil diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Guru membagi kelompok reguler dan PDBK - Siswa berdiskusi tentang materi pelajaran - Mengamati aktivitas siswa - Memberikan pembahasan materi 	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menjelaskan materi yang belum dipahami PDBK - Guru membimbing ABK di ruang khusus - Mengamati aktivitas siswa
3	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menyimpulkan materi pembelajaran - Melakukan penilaian - Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menyimpulkan materi pembelajaran - Melakukan penilaian - Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menyimpulkan materi pembelajaran - Melakukan penilaian - Melakukan

		refleksi	refleks	refleksi
--	--	----------	---------	----------

Faktor penghambat pendidikan inklusif adalah keterbatasan dana dan tenaga pendidik yang ahli dalam bidangnya, kurangnya dana untuk membeli peralatan dan media pembelajaran. GPK di harapkan benar-benar lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa agar dalam melakukan pembelajaran lebih maksimal. Sarana dan prasarana sebagian besar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih kurang memadai. Adaptasi lingkungan fisik juga masih minim. Oleh karena itu segenap warga sekolah dan anggota masyarakat wajib mendukung keberhasilan pendidikan inklusif guna terciptanya pendidikan yang adil tanpa diskriminasi.

Ketepatan dalam menggunakan model akan menumbuhkan semangat dan motivasi belajar anak, sehingga rasa percaya diri dan harga diri anak disabilitas akan meningkat dengan baik. Peningkatan rasa percaya dan harga diri akan membangun rasa penerimaan diri yang lebih baik. Individu dengan penerimaan diri yang positif akan mampu menghayati apa yang ada dalam diri sebagai anugerah. Selanjutnya dengan penerimaan diri yang positif akan membantu anak disabilitas untuk tidak menolak keberadaannya tetapi sebaliknya akan lebih semangat hidup dan mengembangkan dirinya.

Dampak adanya penerapan berbagai model pelayanan pendidikan inklusif yaitu mengoptimalkan peningkatan aspek spiritual, sosial, kognitif dan psikomotor, sekolah inklusif dapat mengatasi diskriminasi, mampu mewujudkan komunikasi yang ramah, membantu masyarakat mendapatkan layanan inklusif dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya pendidikan inklusif.

I. Pendidikan Agama Islam

Pengajaran dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, namun pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Perbedaan pendidikan dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian.¹¹¹ Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya Al-Qur'an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.

Pendidikan secara umum memuat sebuah usaha dan cara-cara yang dipersiapkan oleh pelaku pendidikan dengan persiapan yang matang dan penekanan-penekanan menuju ke arah proses transformasi nilai dan pembentukan kepribadian yang sesungguhnya tidak mudah dilaksanakan. Jika kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai sistem keagamaan kata pendidikan menimbulkan pengertian-pengertian baru dengan penekanan dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang yang digunakan oleh para ahli.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan agama merupakan suatu usaha yang secara sadar dilakukan. guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka

¹¹¹ Ricci, C., & Pritscher, C. P. *The path towards democracy: Holistik education and critical pedagogy*. Holistik Pedagogy, 1,121-127.2015.

pembentukan manusia beragama.¹¹²

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai usaha dan ikhtiar yang sistematis dan sinergis dari berbagai pihak. Masing-masing pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan dan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki.

Setiap orang tua dapat mengajarkan dan mendidik anak anaknya di rumah, masyarakat bisa menyediakan berbagai sarana dan prasarana pengamalan ibadah sebagai bentuk pendidikan praktis kepada anak didik.¹¹³ Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dituntut untuk membuat berbagai regulasi dan kebijakan yang kondusif bagi peserta didik dan masyarakat untuk mendalami dan mempelajari serta mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.¹¹⁴

Pendidikan Islam dipandang sebagai sebuah usaha dan cara kerja yang memiliki tiga karakter, yaitu: Pertama, pendidikan Islam memiliki karakter penekanan pada pencarian dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kedua, pendidikan Islam merupakan sebuah pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang. Ketiga, pendidikan Islam merupakan sebuah pengalaman ilmu atas dasar tanggung jawab kepada

¹¹²Latifah. Peran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 20, No. 1 (2020), pp. 173-197 DOI: 10.20885/millah.vol20.iss1.art7 Millah Vol. 20, No. 1 Agustus 2020 | 173.2020

¹¹³Al Fauzan Amin, Alimni Alimni, Rahmat Perdana, Miftahul Zannah Azzahra, Sabila Eka Septi, Associative and Comparative Study on Students' Perseverance and Religious in Islamic Education Subject, *Jurnal Pendidikan Progresif*, 2021, h. 11

¹¹⁴Hayadin 'Layanan Pendidikan Agama Sesuai Agama Siswa di Sekolah', *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 1(1). doi: 10.32729/edukasi 2017 v 1 62

Tuhan yang Maha Esa.¹¹⁵ Dengan demikian pendidikan Islam sebagai sebuah usaha manusia karena terjalin dalam rangka hubungan antara manusia sekaligus bernilai ibadah kepada tuhan.

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah bagian integral daripada pendidikan nasional sebagai suatu keseluruhan. Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

J. Kurikulum Adaptif Pendidikan Berbasis Inklusif

Kurikulum merupakan bagian penting dari setiap perencanaan pendidikan yang mempengaruhi arah dan tujuan anak didik dalam lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasannya¹¹⁶. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan atau pendidikan yang didalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan, isi/materi, proses dan evaluasi. Tujuan berarti apa yang akan dicapai, materi berarti apa yang akan dipelajari. Proses berarti apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan evaluasi berarti apa yang harus dilakukan untuk mengetahui

¹¹⁵Apduludin & Martinisyamin. *Modeling Analysis, Findings, Development, Organizing the Material and Learning for Students in Islamic Boarding Schools. Jurnal Pendidikan Islam*, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 25-36, June 2022

¹¹⁶ Moh. Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: (AR-RUZZ MEDIA 2013), hkm., 171

keberhasilan pencapaian tujuan. Kurikulum bisa bersifat makro, artinya pengaturan tentang tujuan, isi/materi, proses dan evaluasi dalam skala nasional, tetapi juga bisa bersifat mikro yaitu pengaturan tentang hal tersebut dalam konteks pembelajaran di kelas.

Penerapan model pelayanan pendidikan inklusi dalam konteks kurikulum aktual merujuk pada praktik nyata pembelajaran yang berlangsung di kelas, di mana prinsip-prinsip inklusivitas diwujudkan melalui adaptasi strategi pembelajaran, diferensiasi materi, penyesuaian metode dan media, serta modifikasi asesmen sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam kurikulum aktual, model pelayanan pendidikan inklusi tidak berhenti pada tataran normatif atau perencanaan dokumen kurikulum, tetapi tercermin secara konkret dalam interaksi guru dan peserta didik, pola pendampingan, fleksibilitas capaian pembelajaran, serta layanan individual yang memungkinkan setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, adil, dan setara sesuai dengan potensi dan keterbatasannya¹¹⁷.

Model pembelajaran inklusif mengharuskan guru melayani siswa dengan berbagai kebutuhan belajar. Variasi kebutuhan itu sebenarnya suatu kewajaran dalam kehidupan, dan implikasi untuk dipenuhi secara individual adalah hak asasi. Guru untuk mampu melakukan tuntutan tersebut diperlukan pengaturan bahwa pada setiap tahapan proses mengadaptasi strategi dan metode, serta bagi yang dapat dikolaborasikan antar siswa lebih baik dikolaborasi. Proses kolaborasi dalam belajar antar siswa terjadi bagi siswa yang lebih cepat mencapai target dalam bahan ajar tertentu perlu membimbing temannya yang belum mencapai target

¹¹⁷ Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (7th ed.). Pearson Education.

tersebut¹¹⁸. Siswa yang memiliki keistimewaan di bidang tertentu saling berbagi kemampuan dengan temannya, sebaliknya lemah di bidang lainnya juga perlu menerima bantuan dari temannya yang lebih kuat di bidang tersebut. Kolaborasi akan membangun saling pengetahuan/keterampilan secara konstruktif di antara siswa dengan bantuan guru menggunakan berbagai mediasi. Hal itu berpijak pada teori belajar yang digagas oleh Vygotsky.

Adaptasi kurikulum bagi siswa PDBK di sekolah inklusif merupakan suatu keharusan. Mengingat bervariasinya kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Untuk itu guru mempunyai peranan penting dalam keberhasilan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Pembelajaran adaptif merupakan pembelajaran biasa yang dimodifikasi dan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari, dilaksanakan dan memenuhi kebutuhan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)¹¹⁹. Dengan demikian pembelajaran adaptif bagi ABK atau PDBK hakekatnya adalah Pendidikan Luar Biasa (PLB). Sebab di dalam pembelajaran adaptif bagi PDBK yang dirancang adalah pengelolaan kelas, program dan layanannya.

Pembelajaran adaptif pada intinya adalah modifikasi aktivitas, metode, alat, atau lingkungan pembelajaran yang bertujuan untuk menyediakan peluang kepada anak dengan kebutuhan khusus mengikuti program pembelajaran dengan tepat, efektif serta mencapai kepuasan. Prinsip utama dalam modifikasi aktivitas adalah penyesuaian aktivitas

¹¹⁸ Khoiruman, Wilda Azka Fikriyy & Moh. Ahsan Shohifur Rizal. Desain Kurikulum Pendidikan Berbasis Inklusif Adaptif Merdeka. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (1)12-21.2023

¹¹⁹ Aslan. Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105-119.2017

pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi siswa dalam melakukan aktivitas tersebut.

Dalam modul pelatihan pendidikan inklusif, kurikulum umum yang diberlakukan untuk siswa reguler perlu dirubah atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Penyesuaian kurikulum dengan kemampuan siswa berkebutuhan pendidikan khusus. Penyesuaian kurikulum tidak harus sama pada masing masing komponen, artinya jika komponen tujuan dan materi harus dimodifikasi, mungkin demikian juga proses dan evaluasinya.

Proses penyesuaian juga tidak harus sama untuk semua materi. Materi tertentu perlu dimodifikasi, tetapi mungkin tidak perlu untuk materi yang lain. Proses modifikasi juga tidak sama untuk semua mata pelajaran. Mata pelajaran tertentu mungkin perlu banyak modifikasi tetapi tidak demikian untuk mata pelajaran yang lain. Proses modifikasi juga tidak sama pada masing-masing jenis kelainan. Siswa berkebutuhan khusus yang tidak mengalami hambatan kecerdasan, misalnya: anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, mungkin sedikit membutuhkan modifikasi kurikulum. Sedang siswa yang mengalami hambatan kecerdasan (anak tunagrahita) membutuhkan modifikasi hampir pada pada semua komponen pembelajaran (tujuan, isi, proses dan evaluasi)¹²⁰.

Dalam modul pelatihan pendidikan inklusif, ada empat kemungkinan model kurikulum adaptif, yakni: duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi, dan ada empat komponen utama kurikulum, yakni: tujuan, materi, proses dan evaluasi. Mengembangkan kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus pada dasarnya adalah mengawinkan antara model kurikulum dengan komponen kurikulum.

¹²⁰ Atmojo, S. E., Lukitoaji, B. D., & Noormiyanto, F. Pelatihan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Guru Sekolah Dasar Rujukan Inklusif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 244–252.2020

Setiap satu komponen dari model kurikulum dipadukan dengan setiap komponen kurikulum¹²¹.

Kurikulum untuk siswa berkebutuhan pendidikan khusus pada dasar bervariasi sesuai dengan jenis hambatan yang dialami oleh siswa yang bersangkutan. Setiap jenis hambatan (kelainan) membutuhkan model kurikulum yang berbeda. Namun demikian, kategorisasi kurikulum bagi siswa berkebutuhan pendidikan khusus dalam setting inklusif dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni: 1). Kurikulum bagi PDBK yang tidak mengalami hambatan kecerdasan. Bagi PDBK yang tidak mengalami hambatan kecerdasan seperti anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan lain-lain membutuhkan sedikit modifikasi dalam pembelajaran. Tujuan dan materi pembelajaran umumnya tidak mengalami perubahan, demikian dengan evaluasinya. 2). Kurikulum bagi PDBK yang mengalami hambatan kecerdasan. Bagi Siswa berkebutuhan pendidikan khusus yang mengalami hambatan kecerdasan seperti anak tunagrahita dan anak yang mengalami kelainan lain yang disertai dengan hambatan kecerdasan, biasanya membutuhkan modifikasi hampir pada semua komponen pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dimodifikasi, sama halnya dengan materi, proses dan pelaksanaan evaluasinya.

Desain kurikulum berbasis Inklusif sangat memperhatikan beberapa hal yaitu: Pertama: usaha restrukturisasi yaitu proses pelembagaan keyakinan, nilai dan norma baru tentang fungsi dasar, proses dan struktur suatu lembaga untuk menjamin kepastian, keadilan, dan pemanfaatan usaha pendidikan itu sendiri. Kedua: rekulturisasi yaitu

¹²¹ Khoiruman, Wilda Azka Fikriyy & Moh. Ahsan Shohifur Rizal. Desain Kurikulum Pendidikan Berbasis Inklusif Adaptif Merdeka . *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 2 (1)12-21.2023

proses pembudayaan perilaku seseorang atau kelompok atas keyakinan, nilai dan norma baru yang diharapkan¹²². Pembudayaan nilai kreativitas, otonomi/kemandirian, dan relevansi pendidikan merupakan kunci rekulturasi. Ketiga: refigurasi yaitu proses perekayasaan figur atau tokoh sebagai model atau teladan (kepala sekolah, guru, pamong, orang tua) agar yang bersangkutan memiliki kemampuan dan kesanggupan melembagakan dan membudayakan keyakinan, nilai dan norma baru pendidikan yang diharapkan.

Adaptasi kurikulum juga merupakan salah satu cara untuk pemenuhan hak bagi PDBK yang berada di sekolah inklusif. Karena setiap individu memiliki keterbatasan maka pembelajaran pun disesuaikan dengan keberadaan siswa. Untuk memperlancar proses belajar mengajarnya maka diperlukan rencana untuk membuat adaptasi kurikulum agar semua PDBK dapat terlayani dengan baik. Adaptasi dalam model pembelajaran inklusif saat proses merupakan cara penyesuaian aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus¹²³. Penyesuaian tersebut dilakukan pada tahapan belajar perolehan, tahap ulangan, tahap kecakapan, tahap mempertahankan, tahap perluasan, tahap penyesuaian, dan tahap penyesuaian.

K. Kurikulum Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Mulai tahun pelajaran 2020/2021, pembelajaran PAI di Madrasah menggunakan kurikulum baru untuk Pendidikan Agama Islam, Kemendiknas telah menerbitkan KMA No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah. Saat ini KMA 450 tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah

¹²² Kustawan D. Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya. (Jakarta: PT Luxma Metro Media. 2012)

¹²³ Mariam John Meynert, *Inclusive Education And Perceptions Of Learning Facilitators Of Children With Special Needs In A School In Sweden*. Vol 29, No: 2, 2014

menjadi acuan dalam penerapan pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jadi dasar pengembangan kurikulum PAI tersebut lebih pada adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21.

Ada beberapa prinsip dasar dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum PAI¹²⁴ yaitu: Penataan kembali distribusi materi yang tumpang tindih antar jenjang dan antar kelas, Perumusan level kompetensi yang ditingkatkan untuk membekali peserta didik lebih tinggi dalam berpikir kritis dan inovatif. Sehingga level kompetensi MI ditingkatkan hampir 30 % Kompetensi Dasar (KD) berlevel C4, MTs 70 % dan MA 90% level C4 hingga C6.

Penataan kesinambungan dan keselarasan perumusan antara KD1 Sikap spiritual, KD 2 Sikap Sosial ,KD 3 Pengetahuan dan KD 4 Keterampilan. Penguatan Mata Pelajaran PAI pada aspek sikap dan keterampilan beragama dibanding pengetahuan atau kognitif. Penguatan Mata Pelajaran PAI untuk menghasilkan keyakinan dan penghargaan siswa dalam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat relevan dengan kemajuan zaman. Harapannya dalam pengembangan kurikulum PAI adalah siswa semakin memahami ajaran agama dan bisa menjadi bekal menjadi warga bangsa yang bisa hidup dalam keberagaman dan tetap kompetitif dalam kemajuan zaman¹²⁵.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, dan merupakan mata pelajaran wajib. Tujuan pendidikan nasional

¹²⁴Amir. (2021). *Curriculum Management In Improving Competitive Advantage in Madrasah*. Managers: *Indonesian Journal of Educational Management*, 3(2), 53–61

¹²⁵ Azyumardi Azra, (2014). *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, cet. 2. Jakarta: Kencana,.

berusaha untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius/beragama, bangsa yang dapat menghargai warga negaranya dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya.

Berbagai krisis multidimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak hanya bisa dilihat dan diatasi dengan pendekatan monodimensional. Namun demikian karena pangkal dari krisis tersebut adalah rendahnya moral, akhlak manusia maka, pendidikan agama memiliki andil yang sangat besar dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu diperlukan pembelajaran pendidikan agama Islam yang efektif, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama berkontribusi terhadap penyiapan generasi yang memiliki etika, moral, dan perilaku yang baik.¹²⁶

Pada umumnya praktek penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh pertimbangan subyektif. Misalnya preferensi nilai serta prinsip yang dipilih. Aneka pertimbangan subyektif tersebut sebenarnya bisa dimengerti, mengingat praktek pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas motivasi dan orientasi masyarakat. Dengan merunut pada pertimbangan motivasi dan orientasi masyarakat atau cita-cita sosial di atas, maka praktek penyelenggaraan pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah mempunyai peran penting yang berbeda.

Satu sisi, proses pendidikan dapat melegitimasi terhadap formasi sosial budaya yang ada (*status quo*), sisi yang lain pendidikan berperan membangun atau merubah tatanan sosial budaya menuju yang lebih adil. Perbedaan arah penyelenggaraan pendidikan disebabkan oleh perbedaan ideologinya. Ideologi berupaya menggambarkan mengenai

¹²⁶Maksudin, Pengembangan Metodologi Pendidikan Agama Islam Pendekatan Dialektik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.8.2015

karakteristik umum tentang alam dan masyarakat, serta menjadi panduan perilaku yang bersifat evaluatif.¹²⁷

Secara hirarkis skematis, kebijakan pendidikan terkait ideologi kurikulum paling awal didasari oleh nilai dasar yang paling dijunjung tinggi. Adanya prinsip nilai, kemudian melahirkan prinsip moral, dan prinsip moral ini melahirkan kebijakan sosial yang dalam hal ini adalah filsafat sosial, kemudian melahirkan ideologi politik, sehingga akhirnya sampai pada terwujudnya kebijakan pendidikan terkait pergantian kurikulum.

Pendidikan Agama Islam adalah sebuah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau madrasah, baik dari mulai pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani ajaran-ajaran agama Islam, dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Menurut GBPP PAI di sekolah umum pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk

¹²⁷William F O'Neill. (2002). *Ideologi-ideologi pendidikan*, terjemahan Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 36

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional¹²⁸.

Dalam pembelajaran holistik terdapat model pembelajaran integratif dimana pembelajaran integratif secara sengaja mengaitkan beberapa aspek dalam antar mata pelajaran yang diintegrasikan. Pembelajaran integratif terdapat beberapa karakteristik antara lain: pembelajaran berpusat pada siswa, menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, belajar melalui pengalaman langsung, memperhatikan proses daripada hasil semata dan syarat dengan muatan keterkaitan.

Banyak teori yang mengkaji tentang pendidikan diantaranya yaitu teori pendidikan Taksonomi Bloom. Teori Taksonomi Bloom dibagi menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) yaitu: afektif, kognitif dan psikomotorik. Ranah kognitif mencakup pengetahuan apakah dengan mengungkapkan atau mengenal kembali suatu yang telah pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Ranah afektif mencakup sikap spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian akhlak mulia. Untuk ranah psikomotorik meliputi keterampilan yang diperlukan peserta didik, masyarakat bangsa dan negara¹²⁹.

Karakteristik pembelajaran pendidikan agama Islam idealnya sesuai dengan konsep holistik, jika dibandingkan dengan pemikiran pendidikan Barat yang cenderung sekuler dan materialistik, akibat pemisahan agama dan ilmu, sistem pendidikan agama Islam memiliki karakteristik yang perlu dijadikan sebagai visi, misi, orientasi dan aktualisasi pengembangan sistem pendidikan Islam holistik.

¹²⁸ Deny Harianto dan Nanik Rubiyanto, Strategi Pembelajaran Holistik Integratif di Sekolah, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 4.

¹²⁹ I Putu Ayub Darmawan, Jurnal Satya Widya, Vol. 29, No.1. Juni 2013: 30-39.

Karakteristik yang dimaksud yaitu: Pertama, Pendidikan Agama Islam bersifat rabbani bersumber dari dan bermuara kepada sistem nilai ketuhanan, sumber utamanya adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. sistem Pendidikan Agama Islam juga berorientasi kepada nilai-nilai transendental dan spiritual, tidak hanya berupa mewujudkan kebahagiaan duniawi tetapi juga mewujudkan kebahagiaan ukhrawi. Jadi Pendidikan Agama Islam itu berbasis tauhid, akidah yang benar dan lurus, dan spirit ibadah yang ikhlas karena Allah semata¹³⁰.

Kedua, Pendidikan Agama Islam bersifat berwawasan kemanusiaan dan humanistik, produk Pendidikan Agama Islam hendaknya berorientasi kepada proses humanisasi, pemanusiaan manusia dengan mengedepankan pencerahan, pemberdayaan, pencerdasan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Karena itu Pendidikan Agama Islam memprioritaskan pemberlakuan nilai-nilai moral yang luhur dalam berinteraksi dengan kitab suci maupun dalam mengembangkan wacana keilmuan. Sistem Pendidikan Agama Islam tidak berwujud teori-teori yang tidak membumi melainkan seharusnya mewujudkan sistem sosial, ekonomi, politik, budaya dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih beradab, adil dan sejahtera dengan kata lain Pendidikan Agama Islam harus mampu melayani kepentingan dan kemaslahatan manusia sesuai dengan norma-norma dan nilai nilai yang berakhlak mulia.

Ketiga, Pendidikan Agama Islam bersifat komprehensif dan integratif yang meliputi segala bidang keilmuan, keterampilan (bahasa, sosial, hidup) berorientasi dunia dan akhirat. Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengkaji masalah metafisika seperti yang digeluti oleh filosof

¹³⁰ Chuzaimah Batubara, dkk, Handbook Metodologi Studi Islam, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), hlm. 5.

dan teolog tetapi juga mencakup seluruh bidang dan aspek kehidupan manusia.

Keempat, Pendidikan Agama Islam itu bercita-cita dan bertujuan mulia. Pendidikan Agama Islam tidak menganut paham pemikiran untuk pemikiran, ilmu untuk ilmu, atau seni untuk seni tetapi Pendidikan Agama Islam dikembangkan untuk merealisasikan cita-cita mulia dan luhur yaitu: membangun peradaban dimuka bumi.

L. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada pokok bahasan adab bermedia sosial adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan dan pembiasaan.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang lebih mengedepankan aspek afektif, selain aspek kognitif juga harus membekali peserta didik baik nilai ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak diajarkan melalui berbagai model pembelajaran inovatif berorientasi kontekstual sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada persoalan teoritis yang bersifat kognitif semata, tetapi sekaligus juga mampu mengubah pengetahuan Pendidikan Agama Islam yang bersifat kognitif menjadi bermakna dan dapat diinternalisasikan serta diaplikasikan ke dalam perilaku sehari-hari¹³¹.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa, hakikat pendidikan akhlak adalah inti pendidikan semua jenis pendidikan karena ia mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun

¹³¹ Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 313.

terhadap luar dirinya. Dengan demikian, pendekatan pendidikan akhlak bukan monolitik dalam pengertian harus menjadi nama bagi suatu mata pelajaran atau lembaga, melainkan terintegrasi kedalam bagian mata pelajaran atau lembaga.

Materi pembelajaran aqidah akhlak ini merupakan latihan membangkitkan nafsu-nafsu rububiyah (ketuhanan) dan meredam/menghilangkan nafsu-nafsu syaithoniyah. Pada materi ini peserta didik dikenalkan atau dilatih mengenai: 1) Perilaku/akhlak yang mulia (akhlakul karimah/mahmudah) seperti jujur, rendah hati, sabar, dan sebagainya. 2) Perilaku/akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah) seperti dusta, takabur, khianat, dan sebagainya. Setelah materi-materi tersebut disampaikan kepada peserta didik diharapkan memiliki perilaku-perilaku akhlak yang mulia dan menjauhi/meninggalkan perilaku-perilaku akhlak yang tercela¹³².

M. Karakteristik Mata Pelajaran Rumpun PAI

Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup beberapa mata pelajaran: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik mata pelajaran Aqidah Akhlak dimaksudkan adalah ciri-ciri khas dari mata pelajaran tersebut jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya dalam lingkup pendidikan agama Islam. Untuk menggali karakteristik mata pelajaran bisa bertolak dari pengertian dan ruang lingkup mata pelajaran tersebut, serta tujuan atau orientasinya.

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa secara umum karakteristik mata pelajaran Aqidah Akhlak lebih menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan penghayatan siswa terhadap

¹³² Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Cet 2, hal. 16.

keyakinan/kepercayaan (iman), serta perwujudan keyakinan (iman) dalam bentuk sikap hidup siswa, baik perkataan maupun amal perbuatan, dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat dipahami bahwa ciri-ciri khas (karakteristik) pembelajaran Aqidah Akhlak di madrasah menekankan pada aspek-aspek berikut :

1. Pembentukan keyakinan atau keimanan yang benar dan kokoh pada diri siswa terhadap Allah, Malaikat-malaikatNya, kitab kitabNya, Hari akhir, dan Qada dan qadar, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam kehidupan nyata sehari-hari.
2. Proses pembentukan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan sekaligus, yaitu:
 - a. Pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap akidah yang benar (rukun iman), serta mana akhlak yang baik dan yang buruk terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam lingkungan yang bersifat pelestarian alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai kebutuhan hidup manusia.
 - b. Penghayatan siswa terhadap akidah yang benar (rukun iman), serta kemauan yang kuat dari siswa untuk mewujudkannya dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.
 - c. Kemauan yang kuat (motivasi iman) dari siswa untuk membiasakan diri dalam mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Pembentukan Pendidikan Agama Islam pada siswa tersebut berfungsi sebagai upaya peningkatan pengetahuan siswa tentang akidah akhlak,

pengembangan atau peningkatan keimanan dan ketaqwaan siswa, perbaikan terhadap kesalahan keyakinan dan perilaku, dan pencegahan terhadap akhlak tercela¹³³.

Mata pelajaran Al-Qur'an Hadis menekankan kemampuan membaca, menulis, menghafal, dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis. Bertujuan agar peserta didik menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup. Mengajarkan keterampilan membaca dengan tajwid yang benar serta memahami kandungan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu karakteristiknya menekankan pembentukan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mengajarkan nilai-nilai transendental (hubungan manusia dengan Allah SWT) serta nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Al-Qur'an Hadits di Madrasah sebagai bagian yang integral dari pendidikan agama, memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, tetapi secara substansial mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai agama sebagai terkandung dalam Al Qur'an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari¹³⁴.

Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits mempunyai tujuan dan fungsi, dan tujuan itu sendiri agar peserta didik bergairah untuk membaca Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan baik dan benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya¹³⁵. Sedangkan fungsi dari mata

¹³³ Ibid,..., hal. 311.

¹³⁴ Abuddin Nata. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.2016

¹³⁵ Kementerian Agama RI. *Kurikulum 2013: Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam.2013

pelajaran Al-Qur'an dan Hadits pada madrasah memiliki fungsi: 1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran ajaran Islam yang telah mulai dilaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan sebelumnya. 2. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. 4. Pembiasaan, yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari.

Fiqih merupakan cabang ilmu yang membahas hukum-hukum Islam secara mendalam, mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia. Ruang lingkupnya meliputi tata cara pelaksanaan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta aspek lainnya seperti etika berpakaian, adab dalam bertutur kata, norma pergaulan, hingga tata cara jual beli dan transaksi ekonomi. Dengan berlakunya Kurikulum Merdeka, paradigma pembelajaran pendidikan agama Islam, termasuk bidang fikih, mengalami perubahan signifikan, terutama dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter. Namun, perubahan ini memunculkan tantangan bagi guru dan siswa dalam memahami dan mengimplementasikan materi fiqih secara kontekstual, mengingat karakteristik materi fiqih yang cenderung tekstual dan normatif¹³⁶.

¹³⁶ Ahmad.H. Implementasi pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah: Tantangan dan strategi pengembangan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 123-135.2020

Analisis mendalam terhadap karakteristik materi pendidikan agama Islam khususnya dalam bidang fikih merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa materi tersebut memiliki relevansi tinggi, mendukung kedalaman pemahaman, serta didukung oleh metode pengajaran yang efektif. Upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa peserta didik tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam, termasuk materi fiqh, memerlukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik di era yang terus berkembang¹³⁷.

Adapun tujuan dari pembelajaran fiqh adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta didik mengenai prinsip-prinsip dan tata cara pelaksanaan hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat menjalankan ajaran Islam secara kaffah, yaitu secara menyeluruh dan penuh penghayatan. Muslim yang memahami ilmu fiqh secara komprehensif dan mampu menerapkan keterampilan yang berkaitan dengan fiqh akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cakap dalam melaksanakan ibadah, tetapi juga berpotensi menjadi ahli ibadah yang menginspirasi lingkungannya¹³⁸.

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mengkaji perihal pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di madrasah yang berisi tentang konsep pembelajaran SKI, ruang lingkup pembelajaran SKI, prinsip-prinsip dan karakteristik pembelajaran SKI, komponen-komponen pembelajaran SKI, dan praktek pembelajaran SKI.

¹³⁷ Gafrawi, & Mardianto. Konsep pembelajaran fiqh di Madrasah Aliyah. *Al-Ghazali Journal of Islamic Education*.2023

¹³⁸ Izali, M. Metode pembelajaran fiqh dalam memudahkan pemahaman hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. In *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2).2022

Karakteristik utama mata pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) di MI adalah penekanan pada pengambilan ibrah (pelajaran) dan keteladanan dari sejarah Islam, serta kaitannya dengan kehidupan saat ini melalui nilai-nilai kearifan.

SKI juga bersifat kronologis karena mempelajari peristiwa masa lalu, bersifat kritis berdasarkan sumber sejarah, dan berupaya mengembangkan kecerdasan, sikap, dan kepribadian siswa. Mata pelajaran SKI dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya. Mata Pelajaran SKI pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) dimulai pada kelas 2 hingga kelas 6, sehingga mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) tidak terdapat pada kelas 1 MI. Proses Pembelajaran SKI pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki tujuan serta ruang lingkup yang sudah dijabarkan pada KMA 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab.

N. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Mengenai fungsi pembelajaran Aqidah Akhlak, di dalam Standar Kompetensi Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kurikulum merdeka, telah dijelaskan: 1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga; 2) Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemahan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; 3) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang membahayakan dan menghambat perkembangannya demi menuju manusia Indonesia

seutuhnya. 4) Pengajaran, yaitu menyampaikan informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak. 5) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Aqidah Akhlak; 6) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; 7) Penyaluran peserta didik untuk mendalami Aqidah Akhlak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi¹³⁹.

Tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan Ibnu Maskawaih adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan perbuatan bernilai baik sehingga tercapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Pembelajaran Aqidah Akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang aqidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Setiap kegiatan pendidikan merupakan bagian dari proses untuk menuju suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan merupakan suatu masalah yang fundamental, sebab hal itu akan menentukan ke arah mana peserta didik akan dibawa. Karena pengertian dari tujuan sendiri adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau suatu kegiatan selesai. Adapun tujuan pembelajaran Aqidah Akhlak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: Menurut Moh. Athiyah Al-Abrasyi tujuan dari pendidikan moral atau akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk

¹³⁹ Depag RI, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi), (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), hal. 22.

individu yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan bertingkah laku, bersifat bijaksana, ikhlas, jujur dan suci¹⁴⁰.

Di dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kurikulum madrasah tsanawiyah, mata pelajaran akidah akhlak bertujuan untuk : 1) Siswa memiliki pengetahuan, penghayatan dan keyakinan akan hal-hal yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. 2) Siswa memiliki pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan alam lingkungannya. 3) Siswa memperoleh bekal tentang akidah dan akhlak untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan menengah¹⁴¹.

Menurut Ibnu Maskawaih menyebut ada tiga hal pokok yang yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlak yaitu : 1) hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh 2) hal-hal yang wajib bagi jiwa, dan 3) hal-hal yang wajib bagi hubungannya dengan sesama manusia. b. Sedangkan ruang lingkup Kurikulum Pendidikan Aqidah Akhlak di Madrasah meliputi : Aspek aqidah terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah, keimanan kepada kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat dan mukjizatnya dan hari akhir. 2) Aspek Akhlak terpuji yang terdiri dari atas khauf, taubat, tawadlu", ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, ta'aruf, ta'awun, tafahum, tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji dan bermusyawarah. 3) Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, munafik, namimah dan ghibah.

¹⁴⁰ Moh. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 104.

¹⁴¹ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam...*, hal. 310.

Pendekatan dalam pembelajaran agama islam yaitu : 1) Pendekatan tilawah, yakni membacakan ayat-ayat Allah SWT. Baik yang Qur‘aniyah maupun yang kauniyah sehingga berdampak kemampuan pikir dan dzikir kepada Tuhan. 2) Pendekatan tazkiyah, adalah upaya mensucikan diri dari lingkungan yang dapat merusak akhlak manusia. 3) Pendekatan ta‘lim al-kitab, yakni upaya membelajarkan peserta didik dengan cara mempelajari sumber pokok ajaran Islam Qur‘an dan Sunnah baik lewat membaca maupun menerjemahkan. 4) Pendekatan ta‘lim hikmah, yakni upaya membelajarkan peserta didik dengan cara memahami secara mendalam sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur‘an dan sunnah) dengan menggunakan akal yang sehat dan ketajaman berfikir rasional, disamping membaca dan menerjemahkan. 5) Pendekatan *yu‘allimu malam takunu ta‘lamun*, adalah pendekatan dengan cara menjelaskan makna dibalik suatu yang belum bisa diketahui makna yang sesungguhnya. 6) Pendekatan *ishlah*, yakni memperbaiki pola kehidupan Islami dari berbagai macam persoalan yang berbeda, terjadinya suatu konflik atau perpecahan, karena perbedaan kepentingan¹⁴².

Menurut Abudin Nata¹⁴³ ada beberapa pendekatan yang perlu mendapat kajian lebih lanjut berkaitan dengan pembelajaran Islam diantaranya: Pertama, pendekatan psikologis (*psychological approach*). Pendekatan ini perlu dipertimbangkan mengingat aspek psikologis manusia yang meliputi aspek rasional/intelektual, aspek emosional, dan aspek ingatan. Aspek rasional mendorong manusia untuk merasakan adanya kekuasaan Tertinggi yang gaib sebagai pengendali jalannya alam dan kehidupan. Sedangkan aspek ingatan dan keinginan manusia didorong

¹⁴² Al Fatan Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (UIN-Malang Press, 2008), hal. 50

¹⁴³ Abudin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hal. 2.

untuk difungsikan ke dalam kegiatan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang diturunkan-Nya.

Seluruh aspek dimensi manusia sejatinya dibangkitkan untuk dipergunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedua, pendekatan sosio-kultural (*socio-cultural approach*) Suatu pendekatan yang melihat dimensi manusia tidak saja sebagai individu melainkan juga sebagai makhluk sosial-budaya yang memiliki berbagai potensi yang signifikan bagi pengembangan masyarakat, dan juga mampu mengembangkan sistem budaya dan kebudayaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya¹⁴⁴.

O. Karakteristik Perkembangan Peserta Didik Jenjang Sekolah Dasar

Pembelajaran di sekolah dasar memiliki perbedaan dengan proses pembelajaran pada level pendidikan lainnya. Pembelajaran di sekolah dasar mempertimbangkan aspek perkembangan siswa sekolah dasar yang terdiri dari aspek fisik, kognitif dan psiko sosial. Banyaknya pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pembelajaran akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran yang dikembangkan¹⁴⁵.

Sekolah dasar merupakan sekolah pertama formal yang harus diikuti oleh siswa yang berada di Indonesia¹⁴⁶. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu enam tahun yang dimulai dari kelas satu sampai kelas enam melalui aktivitas yang disusun secara rapi dan terencana. Layaknya sebagai sebuah sekolah, sekolah dasar harus dapat berkembang didalam masyarakat agar dapat memberikan pelayanan dalam mendidik siswa

¹⁴⁴ Ibid, hal. 25.

¹⁴⁵ Latifah, U. Aspek perkembangan pada anak Sekolah Dasar: Masalah dan perkembangannya. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 185-196.2017

¹⁴⁶ Kenedi, A. K., Helsa, Y., Ariani, Y., Zainil, M., & Hendri, S. *Mathematical Connection of Elementary School Students to Solve Mathematical Problems. Journal on Mathematics Education*, 10(1), 69-80.2019.

dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan di sekolah dasar memiliki tujuan besar yang berguna bagi negara dan siswa itu sendiri. Pendidikan di sekolah dasar bertujuan sebagai landasan utama dalam membangun pengetahuan, kecerdasan serta kepribadian agar siswa dapat hidup mandiri dan dapat melanjutkan pendidikannya pada level yang lebih tinggi sehingga diharapkan terbentuklah siswa yang memiliki budi pekerti yang baik¹⁴⁷. Pendidikan di sekolah dasar juga memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang akan digunakan oleh siswa dalam proses kehidupan sehari-hari. Pada proses pengetahuan, siswa pada sekolah dasar akan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan informasi yang bisa digunakan oleh siswa dalam memecahkan pengetahuan sehari-hari¹⁴⁸. Pada keterampilan, siswa akan dibekali dengan segala bentuk keterampilan dalam menunjang siswa untuk dapat aktif memecahkan permasalahan melalui proses berpikir dan proses melaksanakan tindakan.

Pada aspek sikap, siswa sekolah dasar akan dibekali dengan penanaman nilai dan moral sebagai warga negara¹⁴⁹. Oleh sebab itu pendidikan di sekolah dasar harus dapat dilaksanakan dengan maksimal agar tujuan tersebut dapat dicapai oleh siswa. Pendidikan di sekolah dasar tidak akan terlepas dari proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah dasar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar¹⁵⁰. Guru

¹⁴⁷ Darlis, A. Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Terhadap Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal dan Formal. *Jurnal Tarbiyah*, 24(1).2017

¹⁴⁸ Diahwati, R., Hariyono, H., & Hanurawan, F. Keterampilan sosial siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(8), 1612-1620.2016

¹⁴⁹ Hakim, L. Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembentukan Sikap dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(1), 67-77. 2012

¹⁵⁰ Khasanah, U. A., Livana, P. H., & Indrayati, N. Hubungan Perkembangan Psikososial dengan Prestasi Belajar Anak Usia Sekolah. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 2(3), 157-162. 2019

harus mampu mendesain dan melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar. Banyak fakta membuktikan bahwa proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar akan berdampak kepada kualitas pencapaian tujuan pembelajaran¹⁵¹. Banyak nya ditemukan siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar juga merupakan salah satu dampak dari pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar¹⁵². Selain itu adanya isu ketakutan dan kecemasan siswa terhadap proses pembelajaran juga merupakan bukti bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa¹⁵³.

Pembelajaran di sekolah dasar berbeda jauh dari proses pembelajaran pada level pendidikan lainnya. Hal ini dilihat dari aspek perkembangan siswa. Disinilah peran guru untuk mampu memahami karakteristik pembelajaran siswa sekolah dasar sehingga guru dapat merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Banyaknya guru yang lupa melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik perkembangan siswa.

Ada beberapa karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar yang harus diketahui oleh guru agar dapat mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar¹⁵⁴. Siswa sekolah dasar

¹⁵¹ Suryaman, S., & Karyono, H. Revitalisasi Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini di Kelas Rendah Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 27(1), 10-18. 2018

¹⁵² Al Ghazali, M. I. Pengaruh Media Cerita Bergambar Dan Literasi Membaca Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 21(3), 269-282.2019

¹⁵³ Sari, N. Pola Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling untuk Mengoptimalkan Kemampuan Anak Autis di Sekolah Dasar. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 1(2), 31-35.2016

¹⁵⁴ Istiqomah, H., & Suyadi, S. Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta). *El Midad*, 11(2), 155-168.2019

merupakan anak yang sering mengalami perubahan drastis baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Pada umumnya anak usia sekolah dasar memiliki rentang umur antara 6-12 tahun. maka ada berbagai bentuk perkembangan yang terjadi. Namun ada tiga perkembangan utama yang dibahas pada artikel ini yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial. Perkembangan fisik siswa sekolah dasar dapat meliputi proses pertumbuhan biologis seperti pertumbuhan tulang, otot dan otak¹⁵⁵. Usia anak 10 tahun, tinggi dan berat badannya akan mengalami penambahan lebih kurang sebesar 3.5 Kilogram baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun setelah anak mengalami masa remaja dengan perkiraan dimulai pada usia 12-13 tahun, anak perempuan akan lebih berkembang cepas dari pada anak laki-laki.

Perkembangan kognitif siswa sekolah dasar dapat meliputi perubahan yang terjadi dalam pola pikir siswa sekolah dasar¹⁵⁶. Ahli kognitif¹⁵⁷ menyatakan bahwa ada empat fase kognitif yang dialami oleh manusia yaitu: 1. Fase Sensomotorik. Fase ini berada pada rentang 0-2 tahun. Pada fase ini bayi yang baru lahir dengan sejumlah refleks bawaan yang mendorong untuk mengeksplorasi dunianya. 2. Fase praoperasional. Fase ini berada pada rentang 2-7 tahun.

Pada fase ini siswa belajar untuk dapat merepresentasikan dan menggunakan objek melalui kata-kata maupun gambaran sesuatu. 3. Fase operasional konkrit. Fase ini berada pada rentang usia 7-11 tahun. Pada fase ini siswa sudah dapat menggunakan logika. Tahapan ini siswa belajar

¹⁵⁵ Fikriyah, S. N. Analisis Perkembangan Fisik-Motorik Siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Tajem. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 200-207.2021

¹⁵⁶ Bujuri, D. A. Analisis perkembangan kognitif anak usia dasar dan implikasinya dalam kegiatan belajar mengajar. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 9(1), 37-50.2018

¹⁵⁷ Jean Piaget. Cognitive development in children. *Journal of research in science teaching*, 2(3), 176-186. 1964

untuk dapat memahami sesuatu secara logis menggunakan bantuan benda konkret. Pada fase ini lah siswa sekolah dasar berada. Sehingga diperlukan proses pembelajaran dengan penglogikaan melalui benda-benda konkret.

4. Fase operasional formal. Fase ini berada pada rentang usia 12-15 tahun. Pada fase ini kemampuan berpikir sudah dapat dilakukan secara abstrak. selain itu siswa pada masa ini sudah dapat melakukan penalaran secara logis dan dapat menarik kesimpulan dari informasi yang disajikan. Secara rentang umur anak usia sekolah dasar berada pada fase operasional konkret. Fase ini menuntut guru untuk dapat mengembangkan penalaran siswa melalui benda-benda konkret maupun dari pengalaman langsung siswa¹⁵⁸.

Perkembangan psikososial berhubungan erat dengan perkembangan dan perubahan emosi siswa¹⁵⁹. Dengan demikian harus sejalan perkembangan aspek siswa yang meliputi aspek psikis, sosial dan moral. Siswa saat menjelang masuk sekolah telah telah mampu mengembangkam kemampuan berpikir dalam bertindak dan pengaruh sosial secara menyeluruh. Pada masa awal sekolah, siswa masih berada pada masa egosentris terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Artinya siswa pada masa ini masih berpusat kepada diri sendiri dan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungannya seperti keluarga, rumah, dan taman kanak-kanaknya. Setelah siswa memasuki kelas rendah di sekolah dasar, siswa mulai menampilkan rasa percaya diri dan ada juga yang telah bisa menemukan rasa rendah diri.

Pada fase ini siswa akan memperlihatkan bahwa mereka adalah sosok orang yang dewasa. Siswa akan merasa bahwa mereka akan mampu

158

159 Khasanah, U. A., Livana, P. H., & Indrayati, N. Hubungan Perkembangan Psikososial dengan Prestasi Belajar Anak Usia Sekolah. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 2(3), 157-162.2019

mengerjakan tugas dengan sendiri. Maka tahapan ini juga dikenal dengan tahapan “*I can do it myself*”. Siswa yang telah menginjak kelas tinggi akan memiliki daya konsentrasi yang tinggi. Siswa akan mampu menyisihkan waktu lebih terhadap tugas yang mereka senangi dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh¹⁶⁰.

Pada fase ini siswa akan lebih mandiri, mampu bekerjasama dalam kelompok dan berusaha berperilaku agar dapat diterima dalam lingkungannya. Pada fase ini siswa juga sudah mampu melakukan permainan secara jujur. Di Fase ini juga siswa sudah mampu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Siswa kelas rendah akan cenderung melakukan perbandingan sosial terhadap norma-norma yang ada sedangkan pada siswa kelas tinggi telah mampu melakukan perbandingan sosial dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Akibat dari perkembangan kognitif dan fisik ini pada siswa kelas tinggi akan memperlihatkan diri siswa menjadi lebih dewasa.

Pada siswa kelas tinggi mereka ingin diperlakukan seolah menjadi orang dewasa. Perubahan sosial dan emosional yang terjadi pada siswa kelas tinggi, ketika siswa dilibatkan dalam sebuah kelompok akan memunculkan rasa bahwa diri mereka adalah sosok yang berharga. Ketika terjadinya penolakan dalam kelompok akan berdampak kepada permasalahan emosional yang lebih serius. Pada fase ini, siswa akan sangat menghargai keberadaan teman dari pada fase sebelumnya. Pada fase ini siswa akan lebih menyukai keseragaman dalam berteman contohnya pada pakaian yang digunakan. Siswa pada tahapan ini akan sangat menyukai pakaian yang seragam dengan temannya sebagai bentuk

¹⁶⁰ Khaulani, F., Neviyarni, S., & Irdamurni, I. Fase Dan Tugas Perkembangan Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 7(1), 51-59.2020

kesetiakawanan. Pada fase ini hubungan guru dengan siswa akan selalu berubah. Untuk siswa kelas rendah memiliki ketergantungan dengan gurunya sehingga mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya.

Dengan guru memahami karakteristik siswa sekolah dasar dan kebutuhan siswa sekolah dasar, diharapkan agar guru mampu untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai. Proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu diharapkan guru untuk dapat memahami karakteristik siswa sekolah dasar dalam mengembangkan pembelajaran.

Masa perkembangan, anak-anak menuju remaja masih mencari identitas dirinya sehingga akan mencoba-coba hal-hal yang baru, dan membuat anak-anak mulai memahami dirinya ketika memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan emosinya dan bila remaja tidak mampu mengontrol emosi akan berakibat tidak baik sehingga remaja akan berdampak adanya perubahan secara minat yang berbeda, emosi yang tidak stabil, postur tubuh yang tidak baik, pola perilaku yang menyimpang¹⁶¹.

Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan kemampuan anak baik secara kognitif, motorik, afektif dan kecerdasan emosional. Menurut¹⁶² bahwa perkembangan emosi akan jelas pada perubahan tingkah lakunya, dan perkembangan emosi. Dalam kemampuan remaja untuk mengendalikan emosi adalah suatu bentuk remaja dalam mempertahankan

¹⁶¹ Hurlock. Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. (Jakarta : Erlangga, 2011).

¹⁶² Ulfah. Hubungan Kematangan Emosi dan Kebahagiaan pada remaja yang Mengalami Putus Cinta . *Jurnal Ilmiah Psikologi* Volume 9. No. 1, 2016

dorongan emosinya, serta pemahaman dalam mengendalikan emosi diri dalam melakukan tindakan yang baik dan tidak menyimpang. Remaja yang mandiri adalah dapat bertahan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Remaja yang memiliki kematangan diri secara emosi terlihat bahwa diri remaja dapat mengendalikan emosi yang terlihat pada aspek pengetahuan, biologis, dan sosialnya. Remaja dalam mengontrol emosi adalah suatu proses pribadi yang terus menerus untuk mencapai tingkat emosi yang baik, baik secara interpersonal dan intrafisik.

Berdasarkan hasil penelitian ¹⁶³ menunjukkan bahwa emosi yang baik pada remaja putri tidak lebih tinggi dibandingkan pada remaja putra. Hasil tersebut tentunya remaja perlu melakukan penyesuaian terhadap perubahan - perubahan yang mulai timbul. Perubahan ini meliputi aspek biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ¹⁶⁴ menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan dalam mengontrol emosi dengan prestasi akademik, dimana pada siswa/siswi yang dapat mengontrol emosinya maka akan mempunyai prestasi yang baik pula.

Remaja adalah salah satu peralihan pada masa anak menuju masa dewasa dimana pada remaja akan terjadi perbedaan pengetahuannya, biologinya, dan sosialnya atau cara berhubungan dengan orang lain. Perubahan yang terjadi pada remaja juga dapat berubah pada perkembangan fungsi seksualnya misalnya remaja akan dapat berfikir

¹⁶³ Asmidayati . Kematangan Emosi pada Remaja Putri yang melakukan Pernikahan Dini di Desa Kaliagung Kabupaten Kulon Progo. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,2014.h35

¹⁶⁴ Sari, I. K. Keterlibatan Siswa Di Sekolah Sebagai Variabel Moderator Pada Hubungan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Akademik Siswa Smp Muhammadiyah Di Kota Malang (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).2018.h 46

secara abstrak dan remaja juga akan dapat tidak bergantung dengan orang lain¹⁶⁵.

Masa remaja awal yang terjadi pada siswa adalah suatu fase yang siswa dapat mengeluarkan emosi yang saat ini terjadi dan emosi tersebut merupakan energi yang besar sehingga kebanyakan tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Bila siswa tersebut tidak mampu mengontrol emosi maka akan berakibat munculnya perilaku negatif yang dapat merugikan orang lain. Siswa memerlukan kematangan emosi sehingga mempunyai kemampuan dalam mengontrol emosi secara baik dan mampu untuk mengendalikan emosi yang saat ini ada pada dirinya sehingga siswa dapat berpikir untuk kedua kalinya dalam bertindak¹⁶⁶.

Kecenderungan untuk menentang aturan, berbuat kerusuhan atau perkelahian, mencoba coba hal-hal yang menurutnya penuh tantangan dan lain sebagainya. Sehingga pada anak usia remaja cenderung kurang baik dalam hal kontrol emosi. Siswa tampak lebih baik dalam mengontrol emosinya dibandingkan dengan siswi. Hal ini berkaitan dengan perubahan hormonal pada perempuan, dimana pada perempuan ada siklus menstruasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa masa remaja yang terjadi pada siswa dan siswi mempunyai kematangan emosinya yang berbeda mulai dari yang stabil atau baik dan kemampuan dalam mengontrol emosi berbeda dengan orang lainnya¹⁶⁷. Perbedaan ini dapat disebabkan dari kondisi internal seseorang maupun kondisi eksternal.

¹⁶⁵ Sarwono. Psikologi Remaja. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) h.14

¹⁶⁶ Artasari, D. N. Hubungan antara keharmonisan keluarga dengan kematangan emosi pada siswa Diponegoro Tumpang Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). 2017

¹⁶⁷ Handasah, R. R. Pengaruh kematangan emosi terhadap agresivitas dimediasi oleh kontrol diri pada siswa SMA Negeri di Kota Malang. *Happiness. Journal of Psychology and Islamic Science*, 2(2). 2018

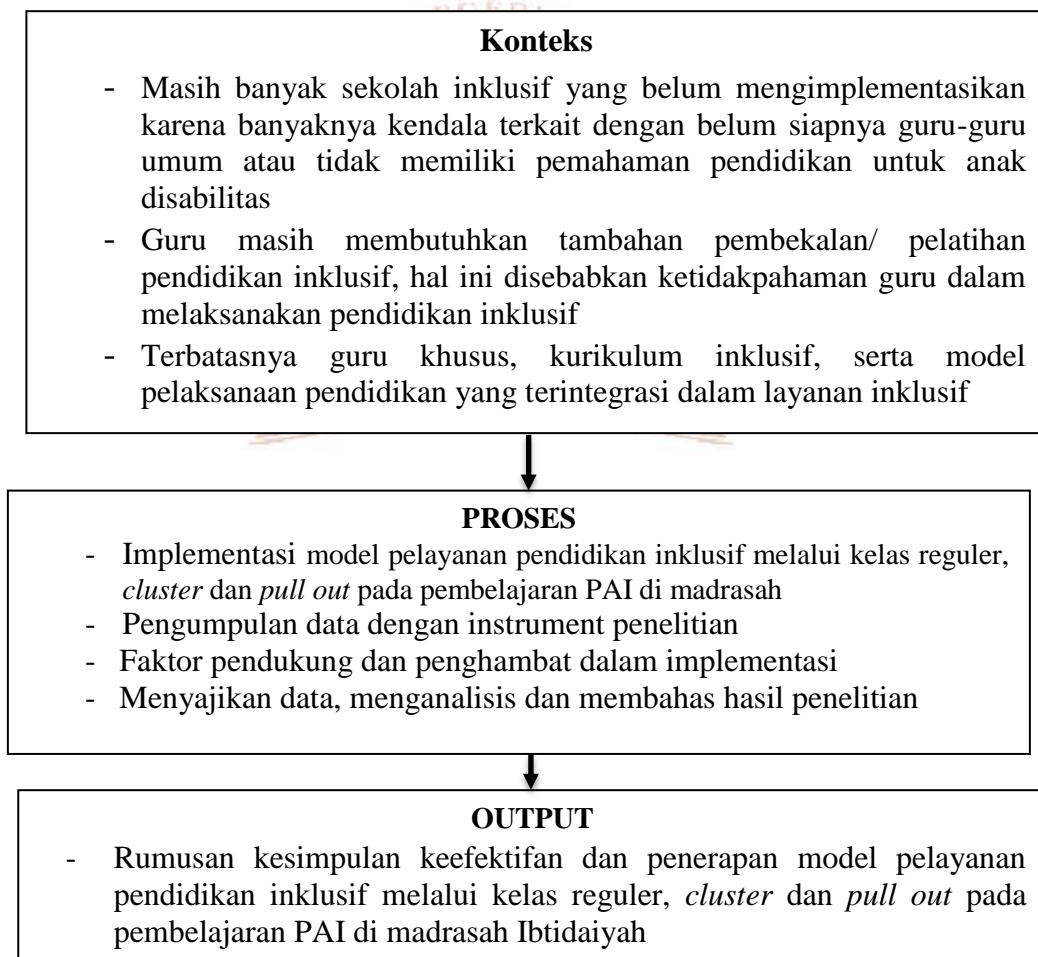
P. Kerangka Pikir

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas semakin memperkuat dukungan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.

Penyandang disabilitas juga berhak mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang menerima anak disabilitas bersama dengan anak normal di sekolah biasa dalam perjalannya masih banyak mengalami hambatan, baik terkait dengan kekurangan siapanya guru, sekolah, dan masyarakat.

Para peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi permasalahan pembelajaran, penilaian, aksesibilitas, dan pelayanan pendidikan. Pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan mereka di madrasah. Hambatan yang terjadi selama ini adalah kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus. Hambatan lainnya yaitu tenaga pendidik yang kurang terlatih, stigma negatif, kebijakan otoritas yang kurang aplikatif, kurangnya pengetahuan tenaga didik, hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber belajar, keterbatasan finansial. Kurang tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lain nya dalam sistem pendidikan madrasah yang inklusif maka perlu penerapan program pelayanan secara bertahap.

Hasil kajian beberapa hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian tentang model pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler, *cluster* dan *pull out* pada pembelajaran PAI di madrasah belum banyak dikaji . Penelitian yang serupa, bidang kajiannya berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini akan difokuskan pada aktualisasi pelayanan pendidikan inklusif melalui kelas reguler, *cluster* dan *pull out* pada pembelajaran PAI di madrasah Madrasah Ibtidaiyah Bengkulu Tengah. Kerangka pikir penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir